



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2026



DATA KEPENDUDUKAN AKURAT PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TEPAT SASARAN



DATA AKURAT
KEBIJAKAN HEBAT



INFORMASI TEPAT
LAYANAN OPTIMAL



ADMINISTRASI TERTIB
MASYARAKAT SEJAHTERA



DUKCAPIL PRIMA
INDONESIA MAJU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya, penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 449/DISDUKCAPIL.800/449/VII/2026 tentang Penetapan Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026.

Proses pengolahan data dan informasi kependudukan yang disajikan dalam buku ini didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2026, yang telah melalui proses pembersihan dan konsolidasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai ketentuan, penyajian DKB dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 30 Juni untuk Semester Pertama dan pada tanggal 31 Desember untuk Semester Kedua. Data ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum serta upaya pencegahan tindak kriminal.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 disusun berdasarkan data hasil registrasi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diperoleh melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Selain itu, data dalam buku ini juga dihimpun dari lintas sektor dan perangkat daerah terkait, sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.

Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sektor-sektor pembangunan daerah maupun pelaku pelayanan publik lainnya, sekaligus memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Lebih jauh, profil ini juga menyajikan gambaran mengenai kuantitas dan kualitas penduduk per wilayah Kecamatan yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan serta indikator strategis lainnya. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian administrasi kependudukan yang lebih tertib, terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan publikasi ini pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh tim yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan dan penyuntingan, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat nyata, menjadi referensi yang terpercaya serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Sumba Timur.

Berbuat baiklah selagi kita diberi kesempatan, agar karya ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua..

Waingapu, 30 September 2026

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Timur, ✓**


SAFRIZANTI UTI DAPADEDA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197106201997032009



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam menyediakan data dan informasi kependudukan yang benar, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah mewujudkan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaannya untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini menegaskan bahwa data kependudukan memiliki peran yang sangat strategis, bukan sekedar catatan statistik, melainkan sebagai instrumen utama dalam perencanaan, pengambilan kebijakan dan pembangunan masyarakat.

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/8458/MD tanggal 20 Desember 2012 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Penyajian data secara periodik dan sistematis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi, dinamika serta prospek kependudukan di Kabupaten Sumba Timur, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kita menyadari bersama bahwa pembangunan yang efektif dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila didukung dengan ketersediaan data yang valid, lengkap dan terkini. Data kependudukan menjadi dasar dalam merancang kebijakan publik, menetapkan sasaran program serta mengukur capaian pembangunan. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur memiliki peran penting dalam menyediakan Satu Data Kependudukan yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Saya meyakini, kehadiran buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi berbagai pihak, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga kalangan akademisi. Data yang tersaji diharapkan dapat memperkuat sinergi, kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Lebih dari itu, buku ini juga menjadi salah satu pijakan penting dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sumba Timur yaitu **“Terwujudnya Sumba Timur Harmonis, Unggul, Mandiri, Berbudaya, Adil (HUMBA) Maju dan Berkelanjutan”**. Dengan dukungan data kependudukan yang akurat, kita dapat mengidentifikasi potensi daerah, menjawab tantangan pembangunan serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya optimis bahwa dengan kerja keras, kebersamaan dan komitmen seluruh pihak, Kabupaten Sumba Timur dapat berkembang menjadi daerah yang lebih sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur beserta pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku ini. Semoga Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 dapat memberikan manfaat yang besar, menjadi referensi yang terpercaya serta memberikan inspirasi bagi kita semua dalam membangun Sumba Timur yang lebih baik di masa depan.

Waingapu, 27 September 2026


BUPATI SUMBA TIMUR

UMBU LILI PEKUWALI, ST, M.T



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	5
A. Letak Geografis Daerah	5
B. Kondisi Demografis Daerah	6
C. Gambaran Ekonomi Daerah	8
1. Pertanian	8
2. Perikanan	9
3. Pertambangan	9
4. Pariwisata	9
D. Potensi Daerah	10
1. Bidang Kesehatan	10
2. Bidang transportasi	11
3. Bidang Pendidikan	11
BAB III SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN	15
A. Data Registrasi.....	15
B. Data yang berasal dari Lintas Sektor terkait	15
1. Dinas Kesehatan.....	15



2. Dinas Sosial	15
3. Dinas Pendidikan	15
4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	16
5. BAPPEDA.....	16
6. Dinas Pariwisata	16
7. BPJS Kesehatan	16
8. Stasiun Meteorologi.....	16
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	17
A. Kuantitas Penduduk	17
a. Jumlah dan persebaran Penduduk	18
1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut jenis kelamin per Kecamatan	18
2. Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio).....	20
3. Laju pertumbuhan Penduduk	21
b. Penduduk menurut Karakteristik Demografi.....	23
c. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	34
B. Kualitas Penduduk.....	56
1. Kesehatan	56
2. Pendidikan	63
3. Ekonomi	66
4. Sosial.....	70
C. Mobiltas Penduduk	74
BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	76
A. Kepemilikan Akta Kelahiran	76
B. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	81
C. Kepemilikan Akta Perkawinan	82



D. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	83
E. Kepemilikan Kartu Keluarga	85
F. Identitas Kependudukan Digital (IKD)	86
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
SASARAN STRATEGIS	90
PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan	18
Tabel 2 - Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah	20
Tabel 3 - Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk	21
Tabel 4 - Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	24
Tabel 5 - Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kelompok Umur	28
Tabel 6 - Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan	30
Tabel 7 - Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif	33
Tabel 8 - Rasio Ketergantungan menurut jenis kelamin	33
Tabel 9 - Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	34
Tabel 10 - Jumlah penduduk menurut Agama dan Kepercayaan	35
Tabel 11 - Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan	37
Tabel 12 - Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Perkawinan	39
Tabel 13 - Jumlah Penduduk, Kepala keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga	44
Tabel 14 - Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga	46
Tabel 15 - Jumlah Proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 16 - Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	49
Tabel 17 - Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja dan Jenis Pekerjaan	51
Tabel 18 - Karakteristik Kepala Keluarga menurut tingkat Pendidikan	52
Tabel 19 - Angka Kelahiran Kasar	54
Tabel 20 - Rasio Anak dan Perempuan (CWR)	57
Tabel 21 - Jumlah penduduk menurut golongan darah	58
Tabel 22 - Angka Kematian Neonatal (NDDR) dan Post Neo Natal	61

Tabel 23 - Angka Kematian Balita	62
Tabel 24 - Angka Putus Sekolah (APS)	64
Tabel 25 - Angka Partisipasi Kasar (APK)	65
Tabel 26 - Angka Partisipasi Murni (APM)	65
Tabel 27 - Jumlah Penduduk menurut Kelompok Pekerjaan	67
Tabel 28 - Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	70
Tabel 29 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 Tahun	77
Tabel 30 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun	78
Tabel 31 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Umum	79
Tabel 32 - Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).....	81
Tabel 33 - Kepemilikan Akta Perkawinan	82
Tabel 34 - Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – EL)	84
Tabel 35 - Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	85
Tabel 36 - Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	87

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses berkelanjutan dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam maupun kemajuan teknologi tetapi juga sangat bergantung pada faktor kependudukan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga data dan informasi kependudukan yang akurat dan komprehensif menjadi kebutuhan mendasar dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan

Pembangunan yang berorientasi kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, karakteristik serta dinamika penduduk pada suatu wilayah. Ketersediaan data kependudukan yang mutakhir di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan. Tanpa memperhatikan faktor kependudukan, pembangunan dapat menghadapi tantangan serius karena setiap pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan penduduk yang terus meningkat..

Dalam konteks ini, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berperan strategis sebagai sumber utama penyediaan data kependudukan yang valid, mencakup jumlah penduduk, struktur, komposisi serta persebarannya. Data tersebut wajib digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik, pelayanan masyarakat serta perencanaan pembangunan.

Salah satu bentuk pemanfaatan data kependudukan dari pengelolaan administrasi kependudukan adalah penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010, profil ini memuat gambaran kondisi, perkembangan serta prospek kependudukan di suatu daerah. Penyusunannya bersumber dari data registrasi kependudukan yang dihasilkan melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis SIAK serta data lintas sektor yang dihimpun dari beberapa instansi terkait.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengelola data kependudukan yang dapat mencerminkan kondisi riil masyarakat di daerah.



Hal ini sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menekankan pentingnya ketersediaan Satu Data Kependudukan di seluruh wilayah administrasi.

Lebih jauh, perkembangan kependudukan dengan segala dimensi dan implikasinya harus menjadi prioritas penting agar dapat tercapai keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Penduduk juga memiliki kewajiban untuk memberikan data yang benar terkait dirinya maupun keluarganya, termasuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami, sepanjang tidak melanggar hak-hak dasar sebagai warga negara.

Oleh karena itu, diharapkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Semester Pertama Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 dapat menyajikan data yang valid, akurat dan terpercaya, baik kuantitas maupun kualitas. Penyajian informasi yang dikemas secara sederhana, komunikatif, informatif serta tepat waktu diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi, karakteristik dan prospek kependudukan di Kabupaten Sumba Timur, sekaligus menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

B. Tujuan

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai bahan acuan dalam merumuskan kebijakan publik baik proses perencanaan pembangunan maupun evaluasi hasil pembangunan yang berwawasan kependudukan.
2. Sebagai sarana publikasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

C. Ruang Lingkup

1. **Pendahuluan:** Berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup serta pengertian umum terkait istilah-istilah yang digunakan dalam profil kependudukan.
2. **Gambaran Umum Daerah:** Memuat informasi tentang letak geografis, kondisi demografis, gambaran ekonomi serta potensi daerah.
3. **Sumber Data:** Bersumber dari data registrasi kependudukan melalui SIAK Semester Pertama Tahun 2026 (Data Konsolidasi Bersih/DKB) serta data lintas sektor yang relevan.
4. **Perkembangan Kependudukan:** Mencakup dimensi kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

- 
- 
- 
5. **Kepemilikan Dokumen Kependudukan:** Data mengenai kepemilikan dokumen seperti Kartu Keluarga, KIA, KTP Elektronik, SKPWNI, Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Akta Pencatatan Sipil.
 6. **Kesimpulan:** Menggambarkan permasalahan kependudukan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi kebijakan.

D. Pengertian Umum

1. **Penduduk:** Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Kependudukan:** Segala hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kematian, kehamilan, persebaran, mobilitas dan kualitas penduduk.
3. **Perkembangan Kependudukan:** Perubahan kondisi kependudukan yang dapat dipengaruhi maupun mempengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
4. **Administrasi Kependudukan:** Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pendayagunaan sektor lain
5. **Data Kependudukan:** Data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. **Kuantitas Penduduk:** Jumlah penduduk akibat perbedaan kelahiran, kematian dan perpindahan.
7. **Kualitas Penduduk:** Kondisi penduduk mencakup aspek fisik dan non-fisik, seperti kesehatan, pendidikan, produktivitas dan ketahanan sosial budaya.
8. **Mobilitas Penduduk:** Gerak perpindahan penduduk melewati batas administrasi wilayah.
9. **Profil Perkembangan Penduduk:** Kumpulan data dan informasi tertulis tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
10. **Persebaran Penduduk:** Sebaran penduduk secara keruangan di suatu wilayah.
11. **Peristiwa Kependudukan:** Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. **Peristiwa Penting:** Kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
13. **Kelahiran/Fertilitas:** Komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk.
14. **Anak Lahir Hidup:** Bayi yang menunjukkan tanda kehidupan saat dilahirkan.

- 
- 
- 
15. **Angka Kelahiran Total (TFR):** Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya.
 16. **Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR):** Jumlah kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu.
 17. **Angka Kelahiran Kasar (CBR):** Jumlah kelahiran per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun.
 18. **Kematian/Mortalitas:** Hilangnya seluruh tanda-tanda kehidupan secara permanen.
 19. **Angka Kematian Bayi Baru Lahir:** Jumlah kematian bayi usia 0–28 hari per 1.000 kelahiran hidup.
 20. **Angka Kematian Bayi (IMR):** Jumlah kematian bayi usia <1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.
 21. **Angka Kematian Kasar (CDR):** Jumlah kematian per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun.
 22. **Rasio Jenis Kelamin:** Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan.
 23. **Umur Median:** Usia yang membagi penduduk menjadi dua bagian sama besar.
 24. **Mobilitas Penduduk:** Gerak perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain.
 25. **Migrasi Permanen:** Perpindahan penduduk dengan tujuan menetap melewati batas administrasi.
 26. **Mobilitas Non Permanen (Sirkuler):** Perpindahan penduduk tanpa tujuan menetap.
 27. **Tenaga Kerja:** Penduduk usia 15–64 tahun yang dapat memproduksi barang dan jasa.
 28. **Penduduk Usia Kerja:** Penduduk berusia 15–64 tahun.
 29. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):** Proporsi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.
 30. **Penduduk Usia Produktif:** Penduduk berusia 15–64 tahun.
 31. **Penduduk Usia Non Produktif:** Penduduk berusia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas.
 32. **Pengangguran:** Penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
 33. **Angka Pengangguran:** Proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
 34. **Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio):** Perbandingan jumlah usia non produktif terhadap usia produktif.
 35. **Rasio Kepadatan Penduduk:** Perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah.
 36. **Child Women Ratio (CWR):** Jumlah anak perempuan usia <5 tahun per 100 perempuan usia 15–49 tahun.

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Letak Geografis Daerah

Kota Waingapu merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sumba Timur dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan sebesar 7.000,5 km² atau sekitar 700.050 hektarserta wilayah laut seluas 8.373,53 km² dengan panjang garis pantai mencapai 433,6 km. Secara administratif, Kabupaten Sumba Timur terdiri atas 22 kecamatan dan 156 desa/kelurahan, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Waingapu.

Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur terletak pada koordinat 119°45' – 120°52' Bujur Timur (BT) dan 9°16' – 10°20' Lintang Selatan (LS), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Sumba
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sabu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah

Topografi wilayah Kabupaten Sumba Timur cukup bervariasi. Sekitar 40% dari total luas wilayah merupakan daerah berbukit terjal, khususnya di bagian selatan, dengan lereng-lereng yang relatif subur dan potensial untuk pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan. Wilayah utara dan tengah didominasi oleh dataran rendah serta padang sabana yang luas, yang menjadi ciri khas Pulau Sumba. Kondisi geografis ini menjadikan Sumba Timur memiliki kekayaan alam yang unik sekaligus tantangan tersendiri dalam pengelolaan tata ruang dan pembangunan wilayah.

Iklim di Kabupaten Sumba Timur beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung cukup panjang dan musim penghujan yang relatif singkat. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Kelas II Umu Mehang Kunda keadaan cuaca periode Januari sampai Juni 2026 yakni suhu udara terendah 21,7°C dan suhu tertinggi mencapai 32,7°C dengan suhu rata-rata pada kisaran 28,0°C. Kelembaban udara rata-rata tercatat 86%, dengan kelembaban terendah 83% dan tertinggi 88%. Pada umumnya curah hujan bulanan berada dalam kategori rendah hingga menengah dengan curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 241,5 mm dengan kategori menengah dan curah hujan dengan kategori rendah pada bulan Juni sebesar 14,9 mm, sementara intensitas penyinaran matahari tertinggi mencapai 86% terjadi pada bulan Juni dan terendah 42% pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata lama penyinaran sebesar 64%. Kondisi iklim ini sangat berpengaruh terhadap pola tanam, ketersediaan air serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.



Selain potensi pertanian, letak geografis Sumba Timur dengan garis pantai yang panjang juga memberikan peluang besar di sektor kelautan dan perikanan. Wilayah pesisir memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya lautserta pengembangan pariwisata bahari. Potensi ini diperkuat dengan keberadaan pelabuhan rakyat dan pelabuhan feri yang mendukung konektivitas antar pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kondisi sosial budaya masyarakat Sumba Timur tidak terlepas dari pengaruh letak geografisnya. Mayoritas penduduk berasal dari Suku Sumba, dengan kehadiran suku-suku lain seperti Suku Sabu dan berbagai suku dari wilayah Nusantara. Kehidupan masyarakat ditandai dengan semangat gotong royong, toleransi serta kuatnya pengaruh adat istiadat yang masih terjaga hingga kini. Letak geografis yang relatif terpencil dibandingkan pusat-pusat urban besar di Indonesia menjadikan masyarakat Sumba Timur tetap memegang erat tradisi, sekaligus terbuka terhadap modernisasi pembangunan.

Secara strategis, letak geografis Kabupaten Sumba Timur menempatkannya sebagai salah satu daerah penting di kawasan timur Indonesia. Posisi ini membuat Sumba Timur berperan sebagai pintu masuk menuju wilayah Pulau Sumba, baik dari sisi transportasi laut maupun udara. Bandar Udara Umu Meheng Kunda dan Pelabuhan Waingapu merupakan simpul transportasi utama yang menghubungkan Sumba Timur dengan wilayah lain di Nusa Tenggara Timur maupun dengan provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Sumba Timur memiliki nilai strategis dalam pengembangan ekonomi, perdagangan, pariwisata serta dalam konteks pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan.

Dengan demikian, letak geografis Kabupaten Sumba Timur tidak hanya menggambarkan posisi fisik di peta, tetapi juga menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi alam, potensi sumber daya serta peran strategis wilayah dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Pemanfaatan yang bijak terhadap potensi geografis diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Sumba Timur yang berkelanjutan.

B. Kondisi Demografis Daerah

Kondisi demografis suatu daerah merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika pembangunan, karena berkaitan langsung dengan jumlah, struktur, distribusi serta perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Unsur-unsur demografi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi), yang secara keseluruhan menentukan pertumbuhan dan perkembangan kependudukan.



Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2026 keadaan 30 Juni 2026, jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur tercatat 285.086 jiwa, terdiri dari 145.675 laki-laki (51,1%) dan 139.411 perempuan (48,9%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada DKB Semester Dua tahun 2025 sebesar 282.303 jiwa sehingga terjadi penambahan 2.783 jiwa atau meningkat sekitar 0,98% dalam kurun waktu enam bulan. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup stabil dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, khususnya di sektor pelayanan dasar.

Secara administratif, jumlah penduduk tersebut tersebar di 22 kecamatan dan 156 desa/kelurahan dengan luas wilayah daratan sebesar 7.000,5 Km². Dengan demikian, kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Sumba Timur mencapai 40 jiwa/Km². Angka ini menunjukkan bahwa secara umum Sumba Timur masih tergolong daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, jika dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun secara nasional.

Distribusi penduduk di Kabupaten Sumba Timur tidak merata. Konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di wilayah perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kecamatan Kota Waingapu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 37,649 jiwa atau sekitar 13,21% dari total penduduk Kabupaten Sumba Timur, dengan luas wilayah 73,8 Km², sehingga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan kecamatan lain. Kecamatan ini sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya adalah Kecamatan Kampera dengan 36.988 jiwa dan Kecamatan Umalulu dengan 20.892 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Kambata Mapambuhang yaitu 4.595 jiwa atau sekitar 0.12% dari total penduduk Kabupaten Sumba Timur yang tersebar di wilayah seluas 412,7 Km², sehingga kepadatan penduduknya tergolong sangat rendah. Ketimpangan distribusi ini memberikan implikasi pada perencanaan pelayanan publik, di mana daerah-daerah padat memerlukan perhatian lebih pada fasilitas infrastruktur, sementara daerah dengan penduduk jarang menghadapi tantangan dalam hal pemerataan layanan dasar.

Secara struktural, penduduk Kabupaten Sumba Timur didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini memberikan potensi positif berupa bonus demografi, yaitu peluang bagi daerah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui optimalisasi tenaga kerja. Namun demikian, jika tidak dikelola dengan baik, tingginya jumlah usia produktif juga dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran dan urbanisasi ke wilayah perkotaan.



Selain itu, dinamika demografi di Kabupaten Sumba Timur juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Perpindahan penduduk ini umumnya terjadi karena alasan pendidikan, pekerjaan, maupun perkawinan. Wilayah perkotaan seperti Kota Waingapu dan Kampera menjadi tujuan utama migrasi karena ketersediaan fasilitas dan lapangan kerja yang relatif lebih banyak dibandingkan wilayah lain.

Dengan demikian, kondisi demografis Kabupaten Sumba Timur menggambarkan adanya pertumbuhan penduduk yang stabil, distribusi penduduk yang tidak merataserta struktur penduduk yang berpotensi mendukung pembangunan daerah jika dikelola dengan tepat. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan, khususnya dalam bidang pelayanan dasar, penyediaan lapangan kerja serta pemerataan infrastruktur antar wilayah.

C. Gambaran Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola potensi sumber daya yang ada dan membangun pola kemitraan dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, melainkan juga pada upaya pemerataan hasil pembangunan dan penguatan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, maupun pariwisata. Potensi tersebut apabila dikelola secara optimal akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesejahteraan masyarakat serta kemandirian ekonomi daerah. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya teknologi pengolahan serta tingkat sumber daya manusia yang perlu terus ditingkatkan.

Adapun sektor-sektor utama yang termasuk dalam potensi ekonomi daerah Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut:

1. Pertanian

Perekonomian Kabupaten Sumba Timur pada dasarnya bercorak agraris, dengan sektor pertanian masih menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Hal ini didukung oleh kondisi geografis dan ketersediaan lahan pertanian yang luas. Komoditas tanaman pangan yang dominan dihasilkan meliputi padi, jagung, sorgum, ubi-ubian dan kacang tanah. Selain itu, sektor peternakan juga memiliki peranan penting, dengan komoditas unggulan berupa kerbau, sapi, kuda dan kambing yang tidak hanya menjadi aset ekonomi tetapi juga memiliki nilai budaya dan sosial bagi masyarakat Sumba.



Sektor pertanian diharapkan terus berkembang dengan adanya program modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi tepat guna serta dukungan kebijakan pemerintah melalui penyediaan sarana produksi pertanian, bibit unggul dan akses pasar yang lebih luas.

2. Perikanan

Dengan garis pantai yang panjang, Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar. Aktivitas nelayan tradisional yang sudah berlangsung sejak lama kini mulai didukung dengan adanya metode penangkapan modern serta potensi budidaya ikan yang dapat dikembangkan di berbagai wilayah pesisir.

Potensi ini menjadi salah satu sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pesisir, baik melalui kegiatan penangkapan maupun pengolahan hasil laut. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk perikanan Sumba Timur di pasar lokal maupun regional.

3. Pertambangan

Kabupaten Sumba Timur juga menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama di sektor pertambangan. Beberapa komoditas yang telah teridentifikasi antara lain emas di Desa Wanggameti Kecamatan Matawai La Pawu serta potensi mangan dan batu bara di wilayah tertentu.

Apabila dikelola dengan baik, sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan PAD dan memperluas kesempatan kerja. Namun, pengelolannya harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, tata ruang wilayah serta kesejahteraan masyarakat sekitar agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Sumba Timur. Dengan kekayaan keindahan alam berupa pantai-pantai eksotis, padang savana yang luas serta budaya lokal yang unik, Sumba Timur telah menjadi salah satu destinasi wisata yang semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pariwisata didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman, kebahagiaan serta kepuasan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013–2033.



Dalam menjamin pengembangan potensi pariwisata sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya, pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 92/DISPARBUD.556.1/292/II/2022 tentang Penetapan Obyek Wisata dan Lokasinya di Kabupaten Sumba Timur. Dalam keputusan tersebut, obyek wisata dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi utama, yaitu:

- a. Obyek Wisata Klasifikasi Maju, yakni obyek wisata yang sudah dikenal luas, memiliki fasilitas yang relatif memadai dan sering dikunjungi wisatawan.
- b. Obyek Wisata Klasifikasi Berkembang, yaitu obyek wisata yang sudah mulai dikenal masyarakat namun masih memerlukan pembangunan infrastruktur dan promosi agar lebih menarik minat pengunjung.
- c. Obyek Wisata Klasifikasi Rintisan, yaitu obyek wisata baru yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari segi keindahan alam maupun daya tarik budaya lokal.

Adapun obyek wisata yang berada di Sumba Timur berjumlah 58 obyek, berdasarkan jenisnya terdiri atas wisata alam sebanyak 31 obyek, wisata budaya sebanyak 24 obyek dan wisata buatan berjumlah 3 obyek. Dari jenis obyek wisata tersebut terdapat obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat lokal, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan menjadi tempat event setiap tahun yang dilaksanakan oleh Pordasi dan obyek wisata yang tidak dikelola karena akses yang sulit ke tempat obyek wisata tersebut.

Dengan berbagai potensi tersebut, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Sumba Timur di kancah nasional maupun internasional.

D. Potensi Daerah

1. Bidang Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang kesehatan sangat berperan dalam memacu peningkatan pendidikan masyarakat yang akan melahirkan masyarakat yang berkualitas dan siap membangun daerah menuju sejahtera serta dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa indikator kesehatan secara umum yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan adalah angka harapan hidup, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, masalah stunting dan gizi buruk.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur keadaan Semester Pertama Tahun 2026, sarana prasarana yang tersedia yaitu terdapat 5 (lima) buah rumah sakit yakni 2 (dua) buah Rumah Sakit milik



Pemerintah yaitu RSUD Umbu Rara Meha dan Rumah Sakit Pratama Nggongi dan 3 (tiga) buah Rumah sakit milik swasta yaitu Rumah Sakit Kristen Lindimara, Rumah Sakit Imanuel dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mitra Ananda serta 5 (lima) buah Klinik yaitu Klinik Pratama Sumba Medika, Klinik Larisa, Klinik Caesar Medika, Klinik Pratama Graha Husada dan Klinik YPK a&arachmat yang semuanya berada di Kota Waingapu dan hanya Rumah Sakit Nggongi yang berada di Kecamatan Karera. Puskesmas Pembantu sebanyak 80 buah, Puskesmas dengan ruang bersalin berjumlah 24 buah, 68 Polindes, 15 Poskesdes, 613 Posyandu yang tersebar di 22 kecamatan, 14 Rumah Tunggu yang berada di 14 kecamatan, 79 Desa Siaga yang tersebar di 22 kecamatan, 26 Apotik, Toko Obat 5 buah dan 39 unit ambulance serta 3 Optik yang berada di kota Waingapu yaitu Optik Bandung, Optik Jaya dan Optik Internasional. Terdapat 1 optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah Optik Internasional. Disamping pelayanan umum kesehatan tersedia juga Asuransi Kesehatan yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain sarana dan prasarana, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Pemerintah juga menyiapkan Sumber Daya Tenaga Kesehatan sebanyak 1.228 orang, yang terdiri dari : Dokter Ahli 20 orang, 45 orang Dokter Umum, 11 orang Dokter PTT, 6 orang Dokter Gigi, 578 orang Perawat, 19 orang Perawat Gigi, 353 orang Bidan, 46 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, 49 orang Tenaga Gizi, 54 orang Tenaga Analis, 35 orang Tenaga Asisten Apoteker, 32 orang Tenaga Farmasi Apoteker, 45 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan.

2. Bidang transportasi

Sistem transportasi darat melalui jalan raya dihubungkan dengan 2 (dua) buah terminal yaitu terminal Kawangu dan terminal Matawai yang berfungsi sebagai pelayanan angkutan pedesaan dan antar kota untuk melayani masyarakat antar Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Kabupaten Sumba Timur juga memiliki 3 (tiga) transportasi laut yakni Pelabuhan Nanga Mesi yang berfungsi sebagai pelayanan antar pulau dan merupakan satu-satunya pelabuhan ekspor-import, Pelabuhan Rakyat (PELRA) dan Pelabuhan Feri Nusantara Kanatang yang berada di Desa Kuta Kecamatan Kanatang yang berfungsi melayani penumpang antar pulau dalam Provinsi NTT yang difasilitasi oleh PT. PELNI Waingapu dan PT. ASDP Waingapu.

Disamping itu juga memiliki pelabuhan udara yakni Bandar Udara Umbu Meheng Kunda, yang dapat didarati oleh pesawat dengan rute penerbangan antar daerah dalam dan luar Provinsi NTT.

3. Bidang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan. Kewenangan di Pusat akan dikurangi dan kewenangan di Daerah akan diperbesar.



Berdasarkan UU tersebut maka urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta pendidikan dasar (SD) dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dengan adanya pengalihan kewenangan ini diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota lebih fokus membenahi pendidikan dasar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa dapat tercapai. Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya sejak Tahun Anggaran 2023 yang mana Bidang Pendidikan termasuk salah satu dari 3 (tiga) Bidang selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum yang memperoleh dana Specific Grant yang dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sumba Timur, adapun sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota dalam hal ini PAUD dan Pendidikan Dasar (SD/SMP) sedangkan SMA merupakan kewenangan provinsi. Adapun sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Timur yakni PAUD/Kelompok Bermain(KB) Swasta sebanyak 258 sekolah, TK sebanyak 71 sekolah (Negeri 55 sekolah, Swasta 16 sekolah), SD sebanyak 265 sekolah (Negeri 199 sekolah, Swasta 66 sekolah), Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 8 sekolah (Negeri 3 sekolah, Swasta 5 sekolah), SMP sebanyak 82 sekolah (Negeri 74 sekolah, Swasta 8 sekolah), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 4 sekolah (Negeri 1 sekolah, Swasta 3 sekolah).: PAUD/Kelompok Bermain(KB) Negeri sebanyak 292 sekolah Negeri,TK Negeri sebanyak 57 sekolah, SD ada 263 sekolah (Negeri 198 sekolah, Swasta 65 sekolah), Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 7 sekolah (Negeri 3 sekolah, Swasta 4 sekolah), SLTP sebanyak 77 sekolah (Negeri 69 sekolah, Swasta 8 sekolah), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 4 sekolah (Negeri 1 sekolah, Swasta 3 sekolah).

Tingkat SMA : Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 1 sekolah, SMA sebanyak 24 sekolah dan SMKN sebanyak 9 sekolah. SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain sekolah, Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 4 (empat) buah Universitas Swasta yakni Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Program Studi Keperawatan (AKPER), Sekolah Tinggi Theologia Lewa dan Sekolah Tinggi Theologia Terpadu.

Adapun jumlah Tenaga Guru di Kabupaten Sumba Timur keadaan Semester Pertama 2026 sebanyak 4.317 orang, yang terdiri dari :

1. Tenaga Guru berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- a. Tenaga Guru PNS sebanyak 1.081 orang berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu :

Tingkat Pendidikan	TK	SD	Mad. Itbidaiyah	SMP	Mad. Tsanawiyah
S2/S1/DIV	15	593	34	285	18
DI/DII/DIII	0	35	0	2	0
SLTA	1	94	0	0	0
SLTP	0	4	0	0	0
Jumlah	16	726	34	287	18

- b. Tenaga Guru P3K sebanyak 1.880 orang berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu :

Tingkat Pendidikan	TK	SD	Mad. Itbidaiyah	SMP	Mad. Tsanawiyah
S2/S1/DIV	106	1.108	37	613	10
DI/DII/DIII	0	0	0	0	0
SLTA	6	0	0	0	0
SLTP	0	0	0	0	0
Jumlah	112	1.108	37	613	10

- c. Tenaga Guru Non ASN sebanyak 1.356 orang berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu :

Tingkat Pendidikan	RA/KB/TK	SD	Mad. Itbidaiyah	SMP	Mad. Tsanawiyah
S2/S1/DIV	158	321	45	254	24
DI/DII/DIII	7	6	0	1	0
SLTA	485	51	0	1	0
SLTP	0	3	0	0	0
Jumlah	650	381	45	256	24

2. Tenaga Guru berdasarkan Jenis Kelamin :

- a. Tenaga Guru PNS sebanyak 1.081 orang berdasarkan Jenis Kelamin yaitu:

Jenis Kelamin	TK	SD	Mad. Itbidaiyah	SMP	Mad. Tsanawiyah
Laki-laki	1	235	10	106	6
Perempuan	15	491	24	181	12
Jumlah	16	726	34	287	18



- b. Tenaga Guru P3K sebanyak 1.880 orang berdasarkan Jenis Kelamin :

Jenis Kelamin	TK	SD	Mad. Itbidaiyah	SMP	Mad. Tsanawiyah
Laki-laki	0	222	8	206	2
Perempuan	112	886	29	407	8
Jumlah	112	1.108	37	613	10

- c. Tenaga Guru Non ASN sebanyak 1.356 orang berdasarkan Jenis Kelamin :

Jenis Kelamin	TK	SD	Mad. Itbidaiyah	SMP	Mad. Tsanawiyah
Laki-laki	59	92	14	75	8
Perempuan	591	289	31	181	16
Jumlah	650	381	45	256	24

SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari sebuah pengamatan (observasi) berupa angka, lambang ataupun sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas.

Keberadaan data merupakan aspek yang sangat penting untuk mengkaji permasalahan, salah satu contohnya adalah permasalahan data kependudukan. Dengan adanya data kependudukan yang akurat maka dapat mempermudah pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial lainnya.

Sumber Data Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini berasal dari :

A. Pelayanan Data Registrasi yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis NIK yang telah dibersihkan dan dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Jakarta keadaan Semester Pertama tahun 2026.

B. Data yang berasal dari Lintas Sektor terkait

Data yang diperoleh dari Lintas Sektor/instansi terkait yang menjadi sumber data adalah:

1. Dinas Kesehatan

Data yang terkait dengan jumlah kelahiran dan kematian Ibu, Bayi dan Balita juga mengenai gizi buruk, Ibu Hamil KEK dan gizi kurang.

2. Dinas Sosial

Data tentang penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

3. Dinas Pendidikan

Data yang terkait dengan data anak sekolah disemua tingkatan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), SLTA , Jumlah guru beserta kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin baik Guru PNS, P3K, maupun Guru Honorer/PTT, Jumlah sekolah, jumlah anak putus sekolah di semua tingkatan dan juga data siswa yang ditamatkan berdasarkan tingkat pendidikan maupun yang putus sekolah.

4. **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

Data yang terkait dengan tenaga kerja dan pencari kerja.

5. **Bappeda**

Data yang terkait dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur

6. **Dinas Pariwisata**

Data yang berkaitan dengan obyek wisata

7. **BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Timur**

Data yang berkaitan dengan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN/APBD)

8. **Stasiun Meteorologi Umu Mehang Kunda Sumba Timur**

yakni Data tentang cuaca yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur selama bulan Januari – Juni 2026.

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika penduduk manusia. Dinamika ini mencakup perubahan ukuran, struktur dan distribusi penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh proses kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan penduduk.

Komposisi Penduduk menurut karakteristik demografi di Kabupaten Sumba Timur akan dilihat berdasarkan struktur dan prosesnya. Keduanya merupakan unsur pembentuk dalam melihat aspek demografi suatu wilayah.

Struktur demografi di Kabupaten Sumba Timur akan dilihat berdasarkan jumlah, pertumbuhan, kepadatan dan distribusinya, sedangkan proses demografi dilihat dari indikator kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) dan migrasi/perpindahan penduduk.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa manfaat dari data kependudukan adalah untuk :

- a. Pelayanan Publik: Mendukung penerbitan dokumen penting seperti Surat Izin Mengemudi, jaminan kesehatan masyarakat, izin usaha, layanan perbankan dan administrasi pajak
- b. Perencanaan Pembangunan: Menjadi dasar perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan sektor lainnya.
- c. Alokasi Anggaran: Menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan kebutuhan penduduk.
- d. Pembangunan Demokrasi: Menyediakan data pemilih pemula dan data agregat penduduk sebagai bahan untuk penyelenggaraan pemilu.
- e. Penegakan Hukum: Membantu pelaksanaan hukum dan pencegahan tindak kriminal.

Komponen Kependudukan meliputi :**A. Kuantitas Penduduk.**

Kuantitas penduduk adalah jumlah total penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Kuantitas ini merupakan hasil dari proses demografi, yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi atau perpindahan penduduk.

Kuantitas Penduduk memuat :

a. Jumlah dan Persebaran Penduduk.

Komposisi penduduk dapat dianalisis berdasarkan berbagai karakteristik, antara lain:

1. Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur dan jumlah anak.
2. Karakteristik sosial, seperti tingkat pendidikan dan status perkawinan.
3. Karakteristik ekonomi, seperti aktivitas ekonomi penduduk, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan serta tingkat pendapatan.
4. Karakteristik geografis atau persebaran, seperti lokasi tempat tinggal (daerah perkotaan dan pedesaan), kecamatan, provinsi dan Kabupaten/kota.

Persebaran (distribusi) penduduk mengacu pada kondisi penyebaran penduduk menurut ruang atau wilayah tertentu. Sedangkan penyebaran penduduk adalah upaya mengatur agar persebaran penduduk menjadi serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Persebaran penduduk (distribusi penduduk) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Persebaran penduduk secara geografis
- 2) Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan.

Jumlah dan persebaran penduduk memuat :

1. Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin Per Kecamatan

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling penting karena berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1 - Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
KOTA WAINGAPU	19.020	18.629	37.649
HAHARU	3.820	3.556	7.376
LEWA	9.302	8.910	18.212
NGGAHA ORI ANGU	5.730	5.633	11.363
TABUNDUNG	5.427	5.150	10.577
PINU PAHAR	4.283	3.974	8.257
PANDAWAI	10.505	10.025	20.530
UMALULU	10.653	10.239	20.892
RINDI	5.964	5.746	11.710
PAHUNGA LODU	7.843	7.799	15.642
WULLA WAIJILU	4.587	4.500	9.087
PABERIWAI	3.804	3.397	7.201
KARERA	4.689	4.510	9.199

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
KAHAUNGU ETI	5.597	5.273	10.870
MATAWAI LA PAWU	3.841	3.517	7.358
KAMBERA	18.839	18.149	36.988
KAMBATA MAPAMBUHANG	2.361	2.234	4.595
LEWA TIDAHU	4.363	4.089	8.452
KATALA HAMU LINGU	2.386	2.375	4.761
KANATANG	6.576	6.264	12.840
NGADU NGALA	3.254	2.903	6.157
MAHU	2.831	2.539	5.370
TOTAL	145.675	139.411	285.086
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.			

Dari tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Keadaan 30 Juni 2026 adalah sebanyak 285.086 jiwa dan untuk tingkat Kecamatan jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Kota Waingapu dengan jumlah 37.649 jiwa (13,33 %). Pada Kecamatan Kota Waingapu dalam 6 (enam) bulan terakhir terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 448 jiwa dari jumlah penduduk 37.201 jiwa pada 31 Desember 2025. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat kelahiran yang tinggi serta akibat migrasi atau pindah datang penduduk dan menurunnya angka kematian. Sedangkan Kecamatan Kambata Mapambuhang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 4.595 Jiwa (1,6 %) ada penambahan sebanyak 86 jiwa jika dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2025. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin nampak bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting untuk diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu.

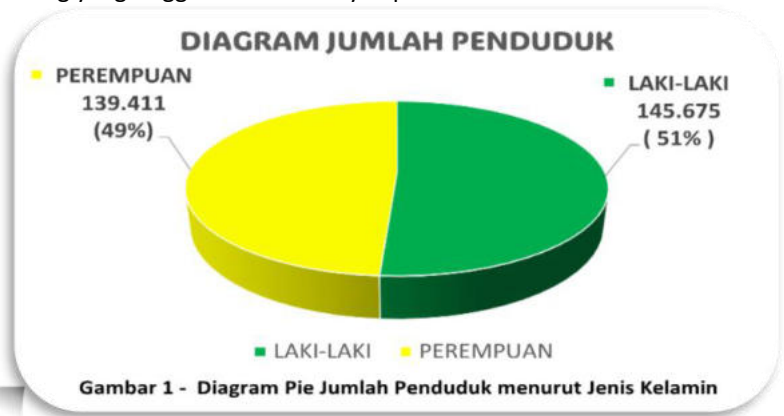


Diagram Pie (Pie Chart) memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari potongan-potongan pie tersebut, dimana setiap potongan pie akan menampilkan ukuran tertentu yang mana total persentasenya harus 100%.

2. Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah, diukur dari perbandingan antara jumlah jiwa terhadap luas wilayah yang dihuni.

Tabel 2 - Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk	Ranking
	Jiwa	%			
KOTA WAINGAPU	37.649	13,2	73,8	510,149	2
HAHARU	7.376	2,6	601,5	12,263	20
LEWA	18.212	6,4	281,1	64,788	4
NGGAHA ORI ANGU	11.363	4,0	286,4	39,675	9
TABUNDUNG	10.577	3,7	514,4	20,562	18
PINU PAHAR	8.257	2,9	246,6	33,483	11
PANDAWAI	20.530	7,2	412,6	49,758	5
UMALULU	20.892	7,3	307,9	67,853	3
RINDI	11.710	4,1	366,5	31,951	12
PAHUNGA LODU	15.642	5,5	349,8	44,717	7
WULLA WAIJILU	9.087	3,2	221,3	41,062	8
PABERIWAI	7.201	2,5	199,7	36,059	10
KARERA	9.199	3,2	334,6	27,493	14
KAHAUNGU ETI	10.870	3,8	475,1	22,879	17
MATAWAI LA PAWU	7.358	2,6	405,4	18,150	19
KAMBERA	36.988	13,0	52	711,308	1
KAMBATA MAPAMBUHANG	4.595	1,6	412,7	11,134	21
LEWA TIDAHU	8.452	3,0	322,1	26,240	16
KATALA HAMU LINGU	4.761	1,7	453,1	10,508	22
KANATANG	12.840	4,5	279,4	45,956	6
NGADU NGALA	6.157	2,2	207,9	29,615	13
MAHU	5.370	1,9	196,6	27,314	15
JUMLAH	285.086	100	7000,5	40,724	

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

Tabel 2 memperlihatkan kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7000,5 km2 yang didiami oleh 285.086 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 40,72 jiwa/km2. Dengan kata lain rata-rata setiap km2 Sumba Timur di diami sebanyak 39-40 jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya (6 bulan terakhir) keadaan 31 desember 2025, ada peningkatan jumlah penduduk sebanyak 2.783 jiwa atau sebanyak 0,98% yang mengakibatkan berpengaruh pada kepadatan penduduk.

Persebaran penduduk antar Kecamatan menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan:

1. Kecamatan Terpadat : Kecamatan Kampera mencatatkan tingkat kepadatan tertinggi mencapai 711,308 jiwa/km² (36.988 jiwa pada luas 52 km²), disusul oleh Kecamatan Kota Waingapu sebesar 510,15 jiwa/km² (37.649 jiwa pada luas 73,8 km²).
2. Kecamatan Terjarang: Kecamatan Katala Hamu Lingu memiliki tingkat kepadatan terendah, yaitu hanya 10,508 jiwa/km² dengan luas wilayah mencapai 453,1 km².

Tingginya konsentrasi penduduk di Kecamatan Kampera dan Kota Waingapu dipengaruhi oleh arus migrasi masuk serta tingginya pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di area urban. Tingkat kepadatan yang terpusat ini berpotensi memicu berbagai isu perkotaan, seperti meningkatnya pengangguran, munculnya pemukiman kumuh, tekanan pada sanitasi lingkungan dan potensi kriminalitas.

Di sisi lain, luasnya wilayah Sumba Timur masih menyajikan potensi lahan yang sangat besar untuk pengembangan dan pemerataan pemukiman di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi khusus dari pemerintah daerah melalui perencanaan tata ruang, tata guna tanah dan pemerataan pembangunan antar-wilayah.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk mengukur persentase perubahan jumlah jiwa di suatu wilayah pada interval waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dinamika perubahan ini dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) serta migrasi (perpindahan penduduk).

Indikator laju pertumbuhan penduduk sangat krusial digunakan sebagai landasan proyeksi kebutuhan sarana-prasarana dasar di masa depan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, ruang terbuka dan kesiapan lapangan kerja.

Tabel 3 - Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan	Penduduk Tahun 2024	Penduduk Tahun 2025	Penduduk Tahun 2026	Angka Pertumbuhan Penduduk
KOTA WAINGAPU	37.013	37.445	37.649	0,86
HAHARU	7.151	7.274	7.376	1,56
LEWA	17.659	18.011	18.212	1,55
NGGAHA ORI ANGU	11.101	11.251	11.363	1,17

Kecamatan	Penduduk Tahun 2024	Penduduk Tahun 2025	Penduduk Tahun 2026	Angka Pertumbuhan Penduduk
TABUNDUNG	10.300	10.459	10.577	1,34
PINU PAHAR	8.103	8.199	8.257	0,95
PANDAWAI	19.907	20.357	20.530	1,55
UMALULU	20.280	20.649	20.892	1,50
RINDI	11.356	11.566	11.710	1,55
PAHUNGA LODU	15.064	15.462	15.642	1,90
WULLA WAIJILU	8.886	9.054	9.087	1,12
PABERIWAI	7.050	7.142	7.201	1,07
KARERA	8.919	9.112	9.199	1,56
KAHAUNGU ETI	10.435	10.687	10.870	2,06
MATAWAI LA PAWU	7.090	7.228	7.358	1,87
KAMBERA	36.153	36.706	36.988	1,15
KAMBATA MAPAMBUHANG	4.479	4.569	4.595	1,29
LEWA TIDAHU	8.213	8.377	8.452	1,44
KATALA HAMU LINGU	4.628	4.692	4.761	1,43
KANATANG	12.382	12.686	12.840	1,83
NGADU NGALA	5.965	6.081	6.157	1,60
MAHU	5.156	5.296	5.370	2,05
JUMLAH	277.290	282.303	285.086	1,40
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.				

Pertumbuhan penduduk adalah persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada interval waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Analisis Laju Pertumbuhan Penduduk

Data pertumbuhan penduduk yang digunakan mengacu pada Data SIAK Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur, dengan rincian:

- Data Penduduk Tahun 2024: Menggunakan Data Konsolidasi Bersih keadaan 31 Desember 2023 (DKB Semester Dua).
- Data Penduduk Tahun 2025: Menggunakan Data Konsolidasi Bersih keadaan 31 desember 2024 (DKB Semester Dua).
- Data Penduduk Tahun 2026: Menggunakan Data Konsolidasi Bersih keadaan 30 Juni 2026 (DKB Semester Pertama).

Pertumbuhan penduduk yang dihitung merupakan pertambahan penduduk dalam kurun waktu 12 bulan (1 tahun), khusus untuk tahun 2026 yang dihitung adalah pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu 6 bulan.

Berdasarkan data tersebut, dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- Tingkat Kabupaten: Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumba Timur sekaligus mencerminkan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2 tahun 6 bulan dari tahun 2024 sampai 2026 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu hanya sebesar 2,47% (tumbuh dari 277.290 jiwa pada tahun 2024 menjadi 285.086 jiwa pada tahun 2026), dengan rata-rata angka pertumbuhan penduduk sebesar 1,40%.
- Tingkat Kecamatan: Jika dilihat menurut kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Mahu yaitu sebesar 2,05%, diikuti oleh Kecamatan Kambata Mapambuhang yaitu sebesar 1,29%.

Sementara itu, berdasarkan rata-rata angka pertumbuhan pada Tabel 3, laju pertumbuhan terendah dicatatkan oleh Kecamatan Kota Waingapu yaitu sebesar 0,86% dan Kecamatan Pinu Pahar sebesar 0,95%.

b. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Komposisi penduduk berdasarkan karakteristik demografi di Kabupaten Sumba Timur ditinjau dari dua aspek utama, yaitu struktur demografi dan proses demografi:

- Struktur Demografi: Menelaah dimensi jumlah, pertumbuhan, tingkat kepadatan serta distribusi spasial penduduk.
- Proses Demografi: Menelaah dinamika variabel vital berupa kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas).

Karakteristik demografi suatu wilayah memiliki keterkaitan langsung terhadap proses-proses sosial dan dinamika perilaku ekonomi masyarakat. Dua variabel utama yang paling fundamental dalam menyusun struktur demografi adalah jenis kelamin dan kelompok umur.

Distribusi penduduk menurut umur disajikan baik dalam format umur tunggal (single age) maupun kelompok umur lima tahunan. Secara makro, struktur umur penduduk dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori utama:

- Penduduk Usia Muda (0–14 tahun): Kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomi.
- Penduduk Usia Produktif (15–59 tahun): Kelompok penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dan potensi ekonomi.
- Penduduk Usia Lanjut (60 tahun ke atas): Kelompok penduduk lanjut usia (mengacu pada penetapan standar WHO).

Struktur penduduk menurut umur berfungsi untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah tergolong berstruktur penduduk muda atau penduduk tua. Suatu wilayah dikategorikan memiliki struktur penduduk muda apabila proporsi penduduk berumur di bawah 15 tahun mencapai 40 persen atau lebih.

Implikasi dari struktur demografi ini memberikan landasan prioritas bagi kebijakan pembangunan daerah:

- Struktur Penduduk Muda: Membutuhkan alokasi investasi pemenuhan fasilitas kesehatan ibu dan anak, gizi seimbang, infrastruktur pendidikan dasar hingga menengah serta perencanaan penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.
- Struktur Penduduk Tua: Membutuhkan kesiapan sistem jaminan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan lansia (geriatri) dan program perlindungan sosial.

Dalam mengukur dan menganalisis komposisi demografi secara terukur dan presisi, digunakan 4 (empat) indikator utama:

- Umur Median (Median Age)
- Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
- Piramida Penduduk
- Rasio Ketergantungan / Beban Tanggungan (Dependency Ratio)

1) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Pemetaan jumlah dan proporsi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin merupakan instrumen mendasar dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar tepat sasaran:

- Kelompok Bayi dan Balita: Memerlukan intervensi prioritas pada asupan gizi seimbang, imunisasi dasar lengkap serta pemantauan tumbuh kembang untuk pencegahan dan penanganan stunting.
- Kelompok Anak Usia Sekolah: Memerlukan daya dukung investasi pendidikan berkualitas serta pembentukan karakter dan keterampilan teknis agar mampu mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkepribadian baik, sehingga siap bersaing saat memasuki dunia kerja.
- Kelompok Remaja Putri: Membutuhkan perhatian khusus pada peningkatan status kesehatan dan gizi (termasuk pencegahan anemia) guna mempersiapkan kesehatan reproduksi menuju usia perkawinan yang sehat.
- Kelompok Lansia: Membutuhkan kemudahan akses pada pelayanan kesehatan terintegrasi serta jaminan perlindungan sosial.

Tabel 4 - Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
00-04	8.296	7.769	16.065
05-09	14.518	13.660	28.178
10-14	15.038	14.132	29.170

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	15.429	14.299	29.728
20-24	13.930	13.452	27.382
25-29	12.652	12.028	24.680
30-34	10.919	10.506	21.425
35-39	9.977	9.644	19.621
40-44	8.977	9.131	18.108
45-49	7.893	7.941	15.834
50-54	7.120	6.911	14.031
55-59	5.728	5.423	11.151
60-64	4.811	4.506	9.317
65-69	3.875	3.751	7.626
70-74	2.765	2.624	5.389
> 75	3.747	3.634	7.381
JUMLAH	145.675	139.411	285.086
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.			

Struktur demografi menurut kelompok umur dan jenis kelamin merupakan instrumen analisis utama yang mendasari penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pemetaan ini berfungsi untuk memastikan penyediaan sarana dan prasarana publik—seperti pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja—dapat teralokasi secara presisi sesuai dengan karakteristik kebutuhan tiap kelompok umur.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026, total populasi sebanyak 285.086 jiwa (terdiri dari 145.675 jiwa laki-laki dan 139.411 jiwa perempuan) terdistribusi ke dalam kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Analisis Komposisi dan Struktur Umur

- Dominasi Penduduk Usia Produktif: Berdasarkan pengelompokan usia kerja (15–64 tahun), Kabupaten Sumba Timur dihuni oleh 181.434 jiwa penduduk usia produktif atau mencapai 63,64% dari total populasi. Proporsi terbesar berada pada kelompok remaja usia 15–19 tahun yaitu sebanyak 29.728 jiwa (10,43%). Dominasi penduduk usia produktif ini memberikan indikasi positif bahwa Kabupaten Sumba Timur sedang berada dalam periode potensi Bonus Demografi, di mana ketersediaan angkatan kerja melimpah untuk mendorong perekonomian daerah.
- Penduduk Usia Non-Produktif: Sebanyak 36,36% sisanya (103.652 jiwa) merupakan kelompok non-produktif, yang terdiri dari penduduk usia belum produktif (0–14 tahun) sebanyak 73.413 jiwa (25,75%) dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) sebanyak 30.239 jiwa (10,61%).

- Distribusi Menurut Jenis Kelamin (*Sex Distribution*):
 - o Laki-laki: Jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada pada kelompok usia 15–19 tahun yaitu sebesar 15.429 jiwa (5,41% dari total populasi).
 - o Perempuan: Jumlah penduduk perempuan terbanyak berada pada kelompok usia 15–19 tahun sebesar 14.299 jiwa (5,02%), disusul oleh kelompok usia 10–14 tahun sebanyak 14.132 jiwa (4,96%).
 - o Karakteristik Spesifik: Secara umum pada hampir seluruh kelompok umur, jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Namun, fenomena sebaliknya terjadi pada kelompok umur 40–44 tahun dan 45–49 tahun, di mana populasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki (pada kelompok 40–44 tahun, populasi perempuan mencapai 9.131 jiwa sedangkan laki-laki 8.977 jiwa).

Implikasi Pembangunan Per Kelompok Umur

- Kelompok Anak (0–14 Tahun): Membutuhkan prioritas investasi daerah pada penguatan asupan gizi seimbang, jangkauan imunisasi dasar, pencegahan stunting serta jaminan akses pendidikan dasar 9 tahun yang merata.
- Kelompok Remaja & Usia Kerja (15–59 Tahun): Memerlukan penguatan pendidikan kejuruan/vokasi, pelatihan keterampilan teknis, perbaikan status kesehatan remaja putri (pencegahan anemia reproduksi) serta perluasan kesempatan kerja lokal.
- Kelompok Usia Lanjut (60+ Tahun): Membutuhkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan khusus geriatri dan skema perlindungan sosial yang terintegrasi.

1. Umur Median (Median Age)

Umur Median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur Median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur Median, penduduk disuatu daerah dikategorikan :

- 1) Penduduk muda, jika umur Median kurang dari 20 tahun
- 2) Penduduk Intermediate, jika umur Median antara 20-30 tahun
- 3) Penduduk tua jika umur Median lebih dari 30 tahun

Untuk menghitung umur median adalah dengan menggunakan Rumus:

$$\text{Umur Median MD} = I_{md} \left[\frac{\frac{N}{2} - F_x}{F_{md}} \right] X_i$$

I_{md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung $N/2$

N = Jumlah Penduduk total

F_x = Jumlah Penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$

F_{md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2$

i = Kelas interval umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
00-04	16.065	16.065	5,64
05-09	28.178	44.243	15,52
10-14	29.170	73.413	25,75
15-19	29.728	103.141	36,18
20-24	27.382	130.523	45,78
25-29	24.680	155.203	54,44
30-34	21.425	176.628	61,96
35-39	19.621	196.249	68,84
40-44	18.108	214.357	75,19
45-49	15.834	230.191	80,74
50-54	14.031	244.222	85,67
55-59	11.151	255.373	89,58
60-64	9.317	264.690	92,85
65-69	7.626	272.316	95,52
70-74	5.389	277.705	97,41
> 75	7.381	285.086	100

Dari tabel di atas, kita mendapatkan komponen rumus sebagai berikut:

I_{md} (Batas bawah kelas median 25–29) = 25 - 0.5 = 24,5

$N/2$ = 142.543

F_x (Kumulatif sebelum kelas median) = 130.523

F_{md} (Frekuensi kelas median) = 24.680

i (Interval/panjang kelas) = 5

Umur Median

$$\begin{aligned} MD &= 24.5 + \left\{ \frac{142,534 - 130,523}{24,680} \right\} \times 5 \\ &= 25 + \left\{ \frac{12,020}{24,680} \right\} \times 5 \\ &= 25 + \{0,48703\} \times 5 \\ &= 25 + 2,4352 = \mathbf{26,94} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Umur Median penduduk Kabupaten Sumba Timur per 30 Juni 2026 adalah 26,94 tahun (dibulatkan menjadi 26,9 tahun atau 27 tahun). Hal ini dimaknai bahwa separuh dari total penduduk Sumba Timur berusia kurang dari 26,9 tahun dan separuh lainnya berusia lebih dari 26,9 tahun.

Dengan nilai Umur Median yang berada pada rentang 20–30 tahun, struktur demografi Kabupaten Sumba Timur dikategorikan sebagai **Penduduk Antara (Intermediate Population)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sumba Timur berada dalam fase transisi demografi dari struktur penduduk muda menuju dewasa, dengan konsentrasi populasi terbesar berada di usia produktif awal dan angkatan kerja muda.

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) adalah indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Indikator ini umumnya dinyatakan sebagai banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Besar kecilnya Rasio Jenis Kelamin dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

- 1) Rasio Jenis Kelamin Saat Lahir (Sex Ratio at Birth): Perbandingan kelahiran bayi laki-laki dan perempuan yang secara biologis umumnya berkisar antara 104–105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- 2) Pola Mortalitas: Perbedaan tingkat kematian antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- 3) Pola Migrasi: Perbedaan mobilitas spasial perpindahan penduduk antara laki-laki dan perempuan.

Informasi Rasio Jenis Kelamin sangat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, perimbangan alokasi pembangunan secara adil serta menjadi rujukan politisi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif.

Tabel 5 - Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Penduduk	Ratio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
00-04	8.296	7.769	16.065	106,78
05-09	14.518	13.660	28.178	106,28

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Penduduk	Ratio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
10-14	15.038	14.132	29.170	106,41
15-19	15.429	14.299	29.728	107,9
20-24	13.930	13.452	27.382	103,55
25-29	12.652	12.028	24.680	105,19
30-34	10.919	10.506	21.425	103,93
35-39	9.977	9.644	19.621	103,45
40-44	8.977	9.131	18.108	98,31
45-49	7.893	7.941	15.834	99,4
50-54	7.120	6.911	14.031	103,02
55-59	5.728	5.423	11.151	105,62
60-64	4.811	4.506	9.317	106,77
65-69	3.875	3.751	7.626	103,31
70-74	2.765	2.624	5.389	105,37
>75	3.747	3.634	7.381	103,11
Jumlah	145.675	139.411	285.086	104,49

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Pada Tabel 5 ini disajikan Rasio Jenis Kelamin menurut kelompok umur. Komposisi ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa hal seperti jumlah tenaga produktif dan tidak produktif, penambahan penduduk dan angka ketergantungan.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026, total jumlah penduduk adalah 285.086 jiwa, terdiri atas 145.675 jiwa laki-laki dan 139.411 jiwa perempuan.

Secara keseluruhan, Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sumba Timur adalah sebesar 104,49. Angka ini mengindikasikan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 104 hingga 105 penduduk laki-laki. Secara umum, populasi penduduk laki-laki di Kabupaten Sumba Timur lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Berdasarkan rincian per kelompok umur pada Tabel 5, gambaran Rasio Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Kelompok Umur 00–04 Tahun:

Jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 8.296 jiwa dan perempuan 7.769 jiwa (total 16.065 jiwa) dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 106,78. Hal ini menunjukkan terdapat sekitar 106–107 balita laki-laki per 100 balita perempuan.

Kelompok Umur 10–14 Tahun:

Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.038 jiwa dan perempuan 14.132 jiwa (total 29.170 jiwa) dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 106,41.

Kelompok Umur 15–19 Tahun (Rasio Tertinggi):

Rasio Jenis Kelamin tertinggi berada pada kelompok umur 15–19 tahun, yaitu sebesar 107,90, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.429 jiwa dan perempuan 14.299 jiwa (total 29.728 jiwa).

Kelompok Umur 40–44 Tahun dan 45–49 Tahun (Rasio < 100):

Pada kelompok umur 40–44 tahun, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yaitu 9.131 jiwa perempuan berbanding 8.977 jiwa laki-laki (total 18.108 jiwa), sehingga Rasio Jenis Kelamin berada di bawah 100 yaitu sebesar 98,31. Demikian pula pada kelompok umur 45–49 tahun, jumlah perempuan sebanyak 7.941 jiwa dan laki-laki 7.893 jiwa (total 15.834 jiwa) dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 99,40.

Kelompok Umur 60–64 Tahun:

Kelompok Umur Pra-Lansia (60–64 Tahun): Populasi laki-laki tercatat sebanyak 4.811 jiwa dan perempuan 4.506 jiwa (total 9.317 jiwa) dengan rasio jenis kelamin kembali meningkat menjadi 106,77.

Tabel 6 - Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah	Ratio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
KOTA WAINGAPU	19.020	18.629	37.649	102,10
HAHARU	3.820	3.556	7.376	107,42
LEWA	9.302	8.910	18.212	104,40
NGGAHA ORI ANGU	5.730	5.633	11.363	101,72
TABUNDUNG	5.427	5.150	10.577	105,38
SPINU PAHAR	4.283	3.974	8.257	107,78
PANDAWAI	10.505	10.025	20.530	104,79
UMALULU	10.653	10.239	20.892	104,04
RINDI	5.964	5.746	11.710	103,79
PAHUNGA LODU	7.843	7.799	15.642	100,56
WULLA WAIJILU	4.587	4.500	9.087	101,93
PABERIWAI	3.804	3.397	7.201	111,98
KARERA	4.689	4.510	9.199	103,97
KAHAUNGU ETI	5.597	5.273	10.870	106,14
MATAWAI LA PAWU	3.841	3.517	7.358	109,21
KAMBERA	18.839	18.149	36.988	103,80
KAMBATA MAPAMBUHANG	2.361	2.234	4.595	105,68
LEWA TIDAHU	4.363	4.089	8.452	106,70
KATALA HAMU LINGU	2.386	2.375	4.761	100,46
KANATANG	6.576	6.264	12.840	104,98
NGADU NGALA	3.254	2.903	6.157	112,09
MAHU	2.831	2.539	5.370	111,50
TOTAL	145.675	139.411	285.086	104,49

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026, nilai Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di seluruh Kecamatan berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan di 22 kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur.

Rasio Jenis Kelamin Tertinggi:

Nilai Rasio Jenis Kelamin terbesar dicatatkan oleh Kecamatan Ngadu Ngala sebesar 112,09 (2.831 jiwa laki-laki berbanding 2.539 jiwa perempuan), yang berarti terdapat sekitar 112 hingga 113 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Posisi tertinggi selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Paberiwai dengan Sex Ratio sebesar 111,98 (3.804 jiwa laki-laki berbanding 3.397 jiwa perempuan).

Rasio Jenis Kelamin Terendah:

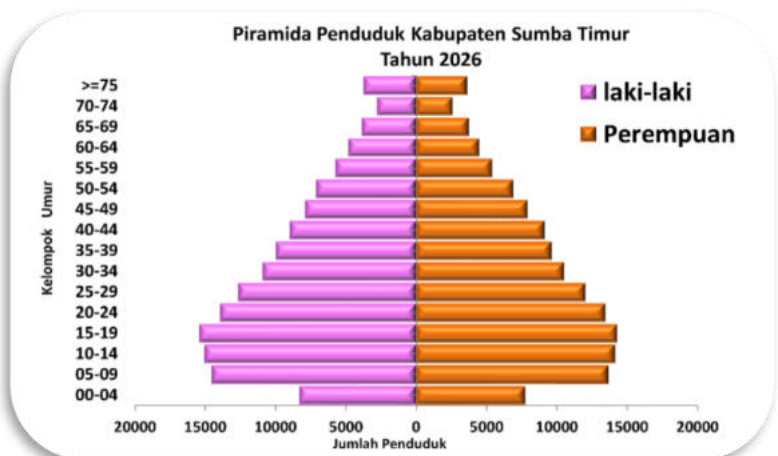
Sebaliknya, nilai Rasio Jenis Kelamin paling mendekati seimbang (terendah) berada pada Kecamatan Katala Hamu Lingu yaitu sebesar 100,46 (2.386 jiwa laki-laki berbanding 2.375 jiwa perempuan) dan Kecamatan Pahunga Lodu sebesar 100,56 (7.843 jiwa laki-laki berbanding 7.799 jiwa perempuan).

Dominasi jumlah penduduk laki-laki di seluruh wilayah kecamatan ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja regional, pemerataan layanan publik dan perlindungan sosial.

1. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah suatu metode grafik untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan kelompok umur lima tahunan dan jenis kelamin pada periode waktu tertentu. Dasar piramida menggambarkan jumlah penduduk usia muda, sedangkan sisi sebelah kiri menggambarkan populasi laki-laki dan sisi sebelah kanan menggambarkan populasi perempuan.

Piramida penduduk berfungsi mempermudah pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, merumuskan kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mengevaluasi data kependudukan secara cepat dan terukur.



Gambar 2 - Piramida Penduduk



Analisis Struktur Piramida Kabupaten Sumba Timur

Berdasarkan struktur data kependudukan Kabupaten Sumba Timur, profil demografi daerah membentuk karakteristik Piramida Penduduk Muda (Expansive):

Dasar Piramida yang Lebar:

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur didominasi oleh kelompok umur usia muda, terutama pada kelompok umur 15–19 tahun (29.728 jiwa) dan kelompok umur 5–9 tahun (28.178 jiwa). Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini mencerminkan tingginya proporsi penduduk usia muda.

Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana:

Lebarnya proporsi penduduk pada kelompok umur 5–9 tahun dan 15–19 tahun menandakan bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan daya tampung fasilitas publik yang memadai, seperti sarana pendidikan (sekolah dan pelatihan vokasi), fasilitas olahraga, layanan kesehatan remaja serta persiapan lapangan kerja.

Puncak Piramida yang Mengerucut:

Sebaliknya, proporsi penduduk pada kelompok usia tua (lansia) relatif kecil yang ditunjukkan oleh bagian puncak piramida yang mengerucut.

2. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (dependency ratio)

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) merupakan indikator demografi-ekonomi yang mengukur perbandingan antara populasi usia non-produktif terhadap populasi usia produktif. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar beban ekonomis yang harus dipikul oleh penduduk usia kerja untuk menopang kehidupan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dalam struktur demografi, penduduk dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

1. Penduduk Belum Produktif (0–14 tahun): Anak-anak dan remaja yang secara ekonomis masih memiliki ketergantungan penuh pada orang tua atau penanggung jawab.
2. Penduduk Usia Produktif (15–64 tahun): Kelompok masyarakat usia kerja yang memiliki potensi ekonomi langsung untuk menghasilkan barang dan jasa dalam pembangunan daerah.
3. Penduduk Tidak Produktif (≥ 65 tahun): Kelompok lanjut usia yang secara umum telah melewati masa pensiun atau masa kerja aktif.

Tabel 7 - Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan
	Non Produktif		Produktif	
	0-14 thn	>= 65 thn	15-64 thn	
Laki-laki	37852	10387	97436	49,51
Perempuan	35561	10009	93841	48,56
Total	73413	20396	191277	49,04

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 7, nilai Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumba Timur tercatat sebesar 49,04. Artinya, dari setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) di Kabupaten Sumba Timur, terdapat beban untuk menanggung sekitar 49 penduduk usia non-produktif (baik usia muda maupun lansia). Jika ditinjau menurut jenis kelamin, rasio ketergantungan pada populasi laki-laki (49,51) sedikit lebih tinggi dibandingkan populasi perempuan (48,56).

Tabel 8 – Rasio Ketergantungan menurut jenis kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ratio Ketergantungan
0-14 Tahun (Umur Muda)	37.852	35.561	73.413	25,75
15-64 Tahun (Umur Produktif)	97.436	93.841	191.277	67,09
>= 65 Tahun (Umur Tua)	10.387	10.009	20.396	7,15
Jumlah	145.675	139.411	285.086	100

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 8, mayoritas populasi Kabupaten Sumba Timur berada pada kelompok umur produktif (15–64 tahun) yaitu sebanyak 191.277 jiwa atau sebesar 67,09% dari total populasi (285.086 jiwa). Besarnya proporsi penduduk usia kerja ini dimana jumlah laki-laki produktif (97.436 jiwa) lebih dominan dibandingkan perempuan produktif (93.841 jiwa)—merupakan modal sosial dan ekonomi yang sangat potensial untuk menggerakkan roda pembangunan daerah.

Demikian juga penduduk berusia >65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun bagi yang pernah bekerja. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih banyak dari pada penduduk usia produktif perempuan.

Rasio Ketergantungan disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk umur muda sebesar 25,75 dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 7,15. Hal ini menunjukkan bahwa angka beban ketergantungan umur muda yang paling berperan dan bertambah tingginya angka beban ketergantungan secara total.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas penduduk dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.

c. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dalam bentuk tabel. Informasi ini bertujuan untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan dan kualitas SDM di Kabupaten Sumba Timur.

Peningkatan SDM di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan, semakin baik kualitas SDM daerah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Menurut beberapa pelaku usaha juga harus ditunjang dengan kepribadian/attitude yang baik, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB). Oleh sebab itu, sangat diharapkan kejujuran masyarakat dalam melakukan pelaporan untuk menentukan pengklasifikasian distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan sehingga database yang terbentuk menjadi akurat dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Tabel distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9 - Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan			
Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	40.196	37.278	77.474
Belum Tamat SD/Sederajat	20.367	17.989	38.356
Tamat SD/Sederajat	36.901	34.425	71.326
SLTP/Sederajat	15.817	15.866	31.683
SLTA/Sederajat	24.772	23.448	48.220
Diploma I/II	391	408	799
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.046	1.967	3.013
Diploma IV/Strata I	5.945	7.834	13.779
Strata II	228	195	423
Strata III	12	1	13
Jumlah	145.675	139.411	285.086
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.			

Dari Tabel 9 ini terlihat bahwa posisi tertinggi untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan berada pada tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebanyak 71.326 jiwa. Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk yang tamat SD/ sederajat untuk

penduduk laki-laki sebanyak 36.901 jiwa, lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan sebanyak 34.425 jiwa. Demikian juga pada jenjang pendidikan SLTA/Sederajat, jumlah penduduk laki-laki (24.772 jiwa) lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan (23.448 jiwa). Sedangkan pada jenjang pendidikan SLTP/Sederajat, jumlah penduduk didominasi oleh penduduk perempuan yaitu sebanyak 15.866 jiwa dibandingkan laki-laki sebanyak 15.817 jiwa.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyediaan program pendidikan, terutama bagi penduduk miskin atau penduduk tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sementara itu untuk jenjang pendidikan tinggi, jumlah penduduk perempuan yang menamatkan jenjang Diploma I/II (408 jiwa), Akademi/Diploma III/Sarjana Muda (1.967 jiwa) dan Diploma IV/Strata I (7.834 jiwa) lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Namun untuk pendidikan Strata II (228 jiwa) dan Strata III (12 jiwa), jumlah penduduk laki-laki yang menamatkannya lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Kabupaten Sumba Timur.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi berdasarkan agama dan kepercayaan Semester Pertama Tahun 2026 yang disajikan perkecamatan dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Sumba Timur.

Tabel 10 - Jumlah penduduk menurut Agama dan Kepercayaan							
Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Kepercayaan TYME (Marapu)
KOTA WAINGAPU	11.984	18.582	5.155	223	14	0	1.691
HAHARU	71	5.363	448	0	0	0	1.494
LEWA	820	15.381	1.760	6	0	0	245
NGGAHA ORI ANGU	10	9.975	784	10	0	0	584
TABUNDUNG	12	9.966	242	0	0	0	357
PANDAWAI	1	8.207	24	0	0	0	25
UMALULU	970	15.260	1.108	13	1	3	3.537
RINDI	1.048	7.298	260	6	0	0	3.098

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Kepercayaan TYME (Marapu)
PAHUNGA LODU	611	12.963	1.730	4	1	0	333
WULLA WAIJILU	54	7.155	1.824	0	0	0	54
PABERIWAI	6	6.965	84	0	0	0	146
KARERA	736	7.955	464	0	0	0	44
KAHAUNGU ETI	26	9.096	690	4	0	0	1.054
MATAWAI LA PAWU	6	7.278	50	0	0	0	24
KAMBERA	872	31.429	4.407	123	3	0	154
KAMBATA MAPAMBUHANG	6	4.215	177	0	0	0	197
LEWA TIDAHU	21	8.036	370	0	0	0	25
KATALA HAMU LINGU	10	4.000	122	0	0	0	629
KANATANG	362	8.067	3.069	17	0	0	1.325
NGADU NGALA	9	5.358	730	0	0	0	60
MAHU	12	3.722	900	0	0	0	736
TOTAL	17.913	222.787	27.063	419	19	3	16.882

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

Berdasarkan data pada Tabel 10, mayoritas penduduk Kabupaten Sumba Timur memeluk agama Kristen yaitu sebanyak 222.787 jiwa (78,15%). Urutan kedua terbesar adalah penganut agama Katolik sebanyak 27.063 jiwa (9,49%), diikuti oleh penganut agama Islam sebanyak 17.913 jiwa (6,28%).

Selanjutnya, penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Marapu) tercatat sebanyak 16.882 jiwa (5,92%). Sementara itu, pemeluk agama Hindu tercatat sebanyak 419 jiwa (0,15%), agama Budha sebanyak 19 jiwa (0,01%) dan penganut Kong Huchu sebanyak 3 jiwa (0,001%).

Jika ditinjau menurut wilayah kecamatan:

- Kristen: Populasi penganut agama Kristen terbesar berada di Kecamatan Kambera (31.429 jiwa), Kota Waingapu (18.582 jiwa) dan Pandawai (16.516 jiwa).
- Katolik: Penganut agama Katolik terbanyak terpusat di Kecamatan Kota Waingapu (5.155 jiwa), Kambera (4.407 jiwa) dan Kanatang (3.069 jiwa).
- Islam: Konsentrasi penduduk beragama Islam terbesar berada di Kecamatan Kota Waingapu (11.984 jiwa), Rindi (1.048 jiwa) dan Umalulu (970 jiwa).
- Kepercayaan Marapu: Keberadaan penganut Kepercayaan Marapu paling dominan berada di Kecamatan Umalulu (3.537 jiwa), Rindi (3.098 jiwa), Kota Waingapu (1.691 jiwa), Haharu (1.494 jiwa) dan Kanatang (1.325 jiwa).

Keberagaman agama dan kepercayaan yang tersebar di seluruh kecamatan ini mengindikasikan pentingnya penguatan toleransi serta kerukunan antarumat beragama, di samping pemenuhan sarana dan prasarana peribadatan yang proporsional di Kabupaten Sumba Timur.

3. Jumlah penduduk menurut kecacatan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (cacat fisik, netra/buta, rungu/wicara, mental/jiwa, fisik dan mental serta cacat lainnya) yang disajikan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Sumba Timur. Selama ini pemerintah pusat terus berupaya untuk memberikan perhatian bagi kelompok penyandang disabilitas dengan memberikan dukungan, memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan mereka. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pelayanan publik baik di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, demokrasi, maupun sosial lainnya.

Informasi jumlah penyandang disabilitas ini sangat diperlukan untuk merencanakan pelayanan publik yang inklusif serta digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas transportasi dan kesempatan kerja.

Tabel 11 - Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan			
PENYANDANG CACAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Cacat Fisik	180	110	290
Cacat Netra/Buta	76	52	128
Cacat Rungu/Wicara	132	118	250
Cacat Mental/Jiwa	222	172	394
Cacat Fisik dan Mental	14	28	42
Cacat Lainnya	48	28	76
TOTAL	672	508	1.180
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.			

Berdasarkan data pada Tabel 11 yang merupakan data hasil Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2026, total penyandang disabilitas yang terdata dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur adalah sebanyak 1.180 jiwa (terdiri dari 672 jiwa laki-laki dan 508 jiwa perempuan).

Rincian proporsi jenis kecacatan adalah sebagai berikut:

1. Cacat Mental/Jiwa: Merupakan kelompok terbesar yaitu sebanyak 394 jiwa (33,39%), yang terdiri dari 222 jiwa laki-laki dan 172 jiwa perempuan.
2. Cacat Fisik: Menempati urutan kedua terbesar sebanyak 290 jiwa (24,58%), terdiri dari 180 jiwa laki-laki dan 110 jiwa perempuan.
3. Cacat Rungu/Wicara: Sebanyak 250 jiwa (21,19%), terdiri dari 132 jiwa laki-laki dan 118 jiwa perempuan.
4. Cacat Netra/Buta: Sebanyak 128 jiwa (10,85%), terdiri dari 76 jiwa laki-laki dan 52 jiwa perempuan.
5. Cacat Lainnya: Sebanyak 76 jiwa (6,44%), terdiri dari 48 jiwa laki-laki dan 28 jiwa perempuan.
6. Cacat Fisik dan Mental: Merupakan kelompok terkecil yaitu sebanyak 42 jiwa (3,56%), terdiri dari 14 jiwa laki-laki dan 28 jiwa perempuan.

Jika dibandingkan dengan data pencatatan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur yang mencatat sebanyak 1.900 jiwa, terdapat selisih atau perbedaan data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penyelarasan data *by name by address*.
- Belum optimalnya keterjangkauan pelayanan "Jemput Bola" Administrasi Kependudukan (Jempol Bola Adminduk), khususnya bagi penyandang disabilitas dan penduduk rentan di wilayah terpencil.
- Masih kurangnya kesadaran atau keterbukaan orang tua/keluarga untuk melaporkan dan mengurus pembaruan dokumen kependudukan anggota familinya yang mengalami disabilitas. Secara fisik mereka adalah penyandang disabilitas, namun secara administrasi kependudukan belum tercatat jenis kecacatannya secara akurat.

Upaya strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi interaktif antar-stakeholder terkait. Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil perlu melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran data terpadu (updating data) penyandang disabilitas agar intervensi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya, dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menghimbau kepada masyarakat serta penyandang disabilitas yang sudah memiliki dokumen kependudukan tetapi belum tercantum jenis kecacatannya, agar segera melaporkan perubahan data sesuai dengan keadaan fisik dan jenis kecacatan yang sebenarnya.

4. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Bagian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai struktur dan proporsi penduduk berdasarkan status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati) per wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Timur pada Semester Pertama Tahun 2026. Dalam kajian

kependudukan (demografi), konsep perkawinan berfokus pada kondisi di mana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam ikatan rumah tangga, baik yang terjalin secara sah berdasarkan ketentuan hukum formal (de jure) maupun yang terbentuk berdasarkan ikatan kemasyarakatan/adat dalam jangka waktu yang lama (de facto).

Informasi mengenai distribusi dan dinamika status perkawinan penduduk memiliki urgensi strategis bagi para penentu kebijakan (*policy makers*) dan perencana program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Data ini menjadi fondasi utama dalam:

1. Perencanaan Pembangunan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi: Membantu dalam memetakan kebutuhan layanan kesehatan ibu dan anak, program Keluarga Berencana (KB) serta intervensi pencegahan stunting sejak dini.
2. Estimasi Tingkat Fertilitas (Kelahiran): Informasi mengenai proporsi penduduk yang berada dalam status kawin (*population at risk of childbearing*) sangat mendasar untuk memproyeksikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*) di masa depan.
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Sosial: Menjadi basis penetapan program bantuan sosial, perlindungan hukum atas hak-hak sipil anak dan perempuan serta penyediaan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender.

Tabel 12 - Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Kecamatan	Kawin	Belum Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
Kota Waingapu	13.155	22.486	232	1.776	37.649
Haharu	2.428	4.623	27	298	7.376
Lewa	6.099	11.324	42	747	18.212
Nggaha Ori Angu	4.033	6.887	27	416	11.363
Tabundung	3.588	6.546	18	425	10.577
Pinu Pahar	3.016	4.962	11	268	8.257
Pandawai	6.870	12.816	44	800	20.530
Umalulu	6.953	12.973	86	880	20.892
Rindi	3.952	7.294	54	410	11.710
Pahunga Lodu	5.243	9.754	38	607	15.642
Wulla Waijilu	3.129	5.584	40	334	9.087
Paberiwai	2.251	4.679	21	250	7.201
Karera	3.257	5.630	29	283	9.199
Kahaungu Eti	3.759	6.664	56	391	10.870
Matawai La Pawu	2.362	4.708	6	282	7.358
Kambara	12.187	22.998	153	1.650	36.988
Kambata Mapambuhang	1.551	2.873	11	160	4.595
Lewa Tidahu	2.912	5.206	20	314	8.452
Katala Hamu Lingu	1.661	2.938	8	154	4.761

Kecamatan	Kawin	Belum Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
Kanatang	4.369	7.949	46	476	12.840
Ngadu Ngala	2.058	3.851	27	221	6.157
Mahu	1.807	3.354	26	183	5.370
Total	96.640	176.099	1.022	11.325	285.086

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

Berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2026 yang tercantum pada Tabel 12, total populasi Kabupaten Sumba Timur yang tercatat sebanyak 285.086 jiwa terdistribusi ke dalam empat kategori status perkawinan dengan rincian analisis sebagai berikut:

1. Status Belum Kawin (176.099 jiwa / 61,77%):
 - o Struktur Dominan: Kelompok penduduk berstatus belum kawin mendominasi komposisi demografi Kabupaten Sumba Timur, yaitu mencapai lebih dari tiga perlima dari total populasi.
 - o Faktor Penyebab: Tingginya proporsi ini dipengaruhi oleh struktur umur populasi Sumba Timur yang didominasi oleh usia muda (anak-anak, pelajar dan mahasiswa) yang belum memasuki usia ideal perkawinan.
 - o Sebaran Wilayah: Jumlah penganut status belum kawin terbesar terkonsentrasi di wilayah pusat perkotaan dan penyangga utama, yaitu Kecamatan Kambera (22.998 jiwa), Kota Waingapu (22.486 jiwa), Umalulu (12.973 jiwa) dan Pandawai (12.816 jiwa).
2. Status Kawin (96.640 jiwa / 33,90%):
 - o Karakteristik Populasi: Kelompok terbesar kedua adalah penduduk berstatus kawin yang mencakup sepertiga populasi daerah. Apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang signifikan dalam melegalisasikan ikatan perkawinan mereka.
 - o Sebaran Wilayah: Kecamatan dengan jumlah penduduk berstatus kawin tertinggi berada di Kota Waingapu (13.155 jiwa), Kambera (12.187 jiwa), Umalulu (6.953 jiwa) dan Pandawai (6.870 jiwa). Pusat-pusat permukiman padat cenderung mencatatkan konsentrasi pasangan kawin yang lebih tinggi sejalan dengan ketersediaan fasilitas ekonomi dan permukiman keluarga.
3. Status Cerai Mati (11.325 jiwa / 3,97%):
 - o Karakteristik Populasi: Kelompok penduduk berstatus cerai mati mencakup hampir 4% dari keseluruhan populasi.
 - o Sebaran Wilayah: Angka cerai mati tertinggi berada di Kota Waingapu (1.776 jiwa) dan Kambera (1.650 jiwa), diikuti Umalulu (880 jiwa) dan Pandawai (800 jiwa).

Tingginya angka ini selaras dengan jumlah lansia di wilayah-wilayah perkotaan/kepadatan tinggi serta tingginya usia harapan hidup di kawasan tersebut.

4. Status Cerai Hidup (1.022 jiwa / 0,36%):

- Karakteristik Populasi: Kategori ini merupakan proporsi paling kecil di Kabupaten Sumba Timur. Rendahnya persentase cerai hidup menunjukkan tingkat ketahanan keluarga yang relatif kuat serta tingginya efektivitas mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat maupun keagamaan sebelum berlanjut ke lembaga peradilan formal.
- Sebaran Wilayah: Kasus cerai hidup paling banyak terdapat di Kota Waingapu (232 jiwa) dan Kampera (153 jiwa), sementara kecamatan hinterland seperti Matawai La Pawu (6 jiwa) dan Katala Hamu Lingu (8 jiwa) mencatatkan tingkat perceraian resmi yang sangat minim

Dalam sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, keabsahan status perkawinan penduduk dikelompokkan ke dalam dua mekanisme pencatatan pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el):

1. Perkawinan Tercatat:

- Ditujukan bagi pasangan suami-istri yang perkawinannya telah disahkan secara hukum agama/kepercayaan masing-masing dan telah didaftarkan secara resmi pada instansi pencatatan sipil negara.
- Bukti keabsahan hukum ditunjukkan dengan penerbitan dokumen resmi berupa Akta Perkawinan (atau Buku Nikah dari KUA bagi pemeluk agama Islam). Status ini memberikan kepastian hukum penuh terhadap hak-hak sipil pasangan maupun anak-anak yang dilahirkan.

2. Perkawinan Tidak Tercatat:

- Ditujukan bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara adat/keagamaan atau telah hidup bersama dalam jangka waktu lama (*de facto*), namun belum terdaftar di instansi pencatatan sipil negara.
- Dalam dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga), status mereka dapat dicantumkan sebagai "Kawin Belum Tercatat" dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan. Langkah penerbitan SPTJM ini merupakan bagian dari inovasi layanan kependudukan agar seluruh anggota keluarga tetap memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hak akses layanan publik.

3. Status Perceraian dan Kematian:

- Cerai Hidup: Keterangan status ini hanya dapat dicantumkan pada KK dan KTP-el apabila ikatan perkawinan telah resmi diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) dan dibuktikan dengan kepemilikan Akta Perceraian.
- Cerai Mati: Status ini dicantumkan berdasarkan adanya pelaporan kematian pasangan yang sah secara hukum, yang diverifikasi dengan penerbitan Akta Kematian.

a) Angka Perkawinan Kasar (APK)

Angka Perkawinan Kasar menggambarkan proporsi total penduduk yang berstatus kawin terhadap keseluruhan jumlah penduduk (tanpa membedakan batasan umur dan jenis kelamin) per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu.. Angka Perkawinan Kasar dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\bar{M} = \frac{M}{P} \times K$$

$$\frac{96.640}{285.086} \times 1000 = 338,9$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa Angka Perkawinan Kasar di Kabupaten Sumba Timur sebesar 339,0 yang artinya bahwa pada Semester Pertama Tahun 2026, dari 1000 penduduk terdapat 339 orang berstatus kawin.

b) Angka Perkawinan Umum (AKU)

Angka Perkawinan Umum memberikan gambaran yang lebih cermat dan representatif dibandingkan APK. Indikator ini membatasi penyebut hanya pada populasi yang berisiko melakukan perkawinan (population at risk), yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam AKU hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja dalam perhitungan yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebagai penyebut.

$$\frac{M}{P_{15+}} \times 1000$$

$$\frac{96.797}{208.704} \times 1000 = 46,38$$

Berdasarkan hasil estimasi proporsi struktur umur produktif (usia 15 tahun ke atas) di Kabupaten Sumba Timur, diperoleh nilai AKU sebesar 46 hingga 47. Hal ini mengandung arti bahwa dari setiap 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk berisiko nikah), terdapat sekitar 46 hingga 47 orang yang telah terikat dalam status perkawinan.

5. Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peran paling mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebagai unit terkecil, keluarga berfungsi sebagai wahana pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik, pembentukan karakter, nilai-nilai moral, maupun pengembangan intelektual. Informasi mendalam mengenai jumlah keluarga dan komposisi anggotanya sangat diperlukan sebagai pijakan dalam merencanakan serta mengimplementasikan berbagai kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan perumahan yang layak, ketahanan pangan, hingga program pengentasan kemiskinan secara terpadu di Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu, perencanaan keluarga menjadi faktor penentu yang sangat vital—tidak hanya terbatas pada upaya pengendalian jumlah anggota keluarga semata, melainkan juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu :

- ✓ Keluarga Inti (Nuclear Family): Tipe keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibuserta anak kandung, anak angkat, maupun anak adopsi yang belum menikah.
- ✓ Keluarga Luas (Extended Family): Tipe keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak (baik yang sudah maupun belum menikah), cucu, orang tua, mertua, hingga kerabat lainnya yang berada dalam satu tanggungan Kepala Keluarga (KK).

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

a) Jumlah keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.

Keluarga terbentuk karena adanya sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi/pengangkatan anak dan lain sebagainya.

Banyaknya anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan bahwa semakin kecil jumlah anggota keluarga, biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Di era demografi modern, fenomena keberadaan keluarga tiga generasi—yang mencakup orang tua, anak, menantu dan cucu—atau yang dikenal dengan istilah sandwich generation family kian marak. Dalam struktur ini, pasangan suami-istri memikul beban ganda untuk menanggung kehidupan generasi di atasnya (orang tua/mertua) sekaligus generasi di bawahnya (anak dan cucu). Kondisi ini melahirkan implikasi serius terhadap tingkat kesejahteraan, besarnya beban ekonomi keluargaserta efektivitas sistem pengasuhan anak dan perawatan lansia dalam satu rumah tangga.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistim pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga seperti ini.

Rata-rata jumlah anggota keluarga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{AK} = \text{Rata - rata jumlah anggota keluarga}$$

$$\sum \text{Pddk} = \text{Jumlah penduduk}$$

$$\sum \text{KK} = \text{Jumlah Kepala Keluarga}$$

Tabel 13 - Jumlah Penduduk, Kepala keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga

Kecamatan	Jlh Penduduk	Jlh Kepala Keluarga	Rata-Rata Anggota
KOTA WAINGAPU	37.649	10.588	3,56
HAHARU	7.376	2.212	3,34
LEWA	18.212	4.939	3,69
NGGAHA ORI ANGU	11.363	3.408	3,34
TABUNDUNG	10.577	3.589	2,95
PINU PAHAR	8.257	2.359	3,51
PANDAWAI	20.530	5.496	3,74
UMALULU	20.892	5.611	3,72
RINDI	11.710	3.062	3,83
PAHUNGA LODU	15.642	4.236	3,70
WULLA WAIJILU	9.087	2.451	3,71
PABERIWAI	7.201	2.036	3,54
KARERA	9.199	2.530	3,64
KAHAUNGU ETI	10.870	3.003	3,62
MATAWAI LA PAWU	7.358	2.147	3,43
KAMBERA	36.988	10.374	3,57
KAMBATA MAPAMBUHANG	4.595	1.240	3,71
LEWA TIDAHU	8.452	2.236	3,78
KATALA HAMU LINGU	4.761	1.235	3,86
KANATANG	12.840	3.393	3,79
NGADU NGALA	6.157	1.915	3,22
MAHU	5.370	1.617	3,33
TOTAL	285.086	79.677	3,58

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Berdasarkan hasil konsolidasi data pada Tabel 13, Kabupaten Sumba Timur mencatatkan total populasi sebanyak 285.086 jiwa yang terbagi ke dalam 79.677 Kepala Keluarga (KK). Dari rasio tersebut, diperoleh rata-rata anggota keluarga di tingkat Kabupaten sebesar 3,58 orang (atau dibulatkan menjadi 3–4 orang per keluarga). Oleh sebab itu perlu dirancang program yang terkait dengan upaya



meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk. Dari temuan data di atas, dapat ditarik beberapa poin analisis kependudukan secara mendalam:

1. Dominasi Tipe Keluarga Inti (*Nuclear Family*): Rata-rata nasional/kewilayahan dengan besaran 3,58 orang per KK mengindikasikan bahwa struktur keluarga di Kabupaten Sumba Timur mayoritas telah berbentuk Keluarga Inti (*Nuclear Family*), yang umumnya terdiri dari pasangan suami-istri dengan 1 hingga 2 orang anak. Angka ini mencerminkan pergeseran pola kehidupan masyarakat dari struktur keluarga besar (*extended family*) menuju unit keluarga yang lebih terukur dan mandiri.
2. Variasi Beban Keluarga Antar-Kecamatan:
 - Angka Rata-Rata Tertinggi: Kecamatan Katala Hamu Lingu mencatatkan angka rata-rata anggota keluarga tertinggi, yaitu 3,86 orang/KK, diikuti oleh Rindi (3,83 orang/KK), Kanatang (3,79 orang/KK) dan Lewa Tidahu (3,78 orang/KK). Wilayah-wilayah ini memiliki ukuran keluarga yang relatif lebih besar, yang membutuhkan perhatian ekstra pada aspek kecukupan gizi, sanitasi lingkungan serta fasilitas pendidikan dasar.
 - Angka Rata-Rata Terendah: Kecamatan Tabundung mencatatkan rata-rata anggota keluarga paling rendah di Kabupaten Sumba Timur, yaitu 2,95 orang/KK, diikuti oleh Ngadu Ngala (3,22 orang/KK) dan Mahu (3,33 orang/KK). Angka di bawah 3 orang per KK ini menunjukkan ukuran keluarga yang sangat ringkas, yang dapat dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk, tingginya pembentukan KK baru, atau angka kelahiran yang makin terkendali.
3. Konsentrasi Rumah Tangga di Pusat Perkotaan: Dua wilayah dengan jumlah Kepala Keluarga terbanyak adalah Kota Waingapu (10.588 KK dengan rata-rata 3,56 orang/KK) dan Kampera (10.374 KK dengan rata-rata 3,57 orang/KK). Gabungan kedua kecamatan ini menampung sekitar 26,3% dari total KK di Kabupaten Sumba Timur. Tingginya kepadatan KK di kawasan perkotaan ini memerlukan tata kelola permukiman yang terstruktur guna menjamin keterjangkauan air bersih, pengelolaan sampah serta akses terhadap fasilitas kesehatan masyarakat.

Melihat dinamika ukuran dan komposisi keluarga di Kabupaten Sumba Timur pada Semester Pertama Tahun 2026, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan terpadu sebagai berikut :

1. Penguatan Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi: Meskipun rata-rata anggota keluarga berada pada kategori ideal (3 – 4 orang), peningkatan akses dan pelayanan kontrasepsi berkelanjutan - khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tetap harus diperluas di seluruh Puskesmas dan Posyandu guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang.
2. Intervensi Khusus Ketahanan Keluarga dan Penurunan Stunting: Ukuran keluarga yang terkendali memberikan momentum emas untuk meningkatkan kualitas pengasuhan (*parenting*). Program pembinaan keluarga balita (BKB) dan intervensi gizi terpadu harus diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan rata-rata anggota keluarga yang masih tinggi untuk mencegah risiko tengkes (*stunting*).
3. Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan (*Sandwich Generation*): Pemerintah daerah perlu memetakan keluarga-keluarga yang menanggung beban ganda (lansia dan anak-anak sekaligus) untuk disinergikan dalam skema perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan daerah serta bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

b) Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)

Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) merupakan kualifikasi kedudukan setiap individu anggota keluarga terhadap Kepala Keluarga (KK) dalam suatu rumah tangga. Indikator SHDK sangat penting dalam demografi dan perencanaan pembangunan untuk memetakan:

1. Struktur Kepemimpinan Rumah Tangga: Melihat distribusi Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin, khususnya proporsi Kepala Keluarga Perempuan (*Female-Headed Households*).
2. Pola Pengaturan Tempat Tinggal (*Living Arrangement*): Memahami apakah susunan rumah tangga masyarakat di Sumba Timur lebih didominasi oleh Keluarga Inti (*Nuclear Family*) atau Keluarga Luas (*Extended Family*).
3. Pola Pengasuhan dan Beban Tanggungan: Mengidentifikasi tingkat kerentanan keluarga, peran pengasuhan anak serta keberadaan anggota keluarga non-inti (seperti orang tua/mertua lansia, famili lain, hingga pembantu/asisten rumah tangga).

Tabel - 14 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga			
Status Hub Dalam Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Keluarga	59.795	19.882	79.677
Suami	8	0	8
Isteri	0	45.111	45.111

Status Hub Dalam Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Anak	76.810	65.566	142.376
Menantu	1	1	2
Cucu	2.652	2.309	4.961
Orang Tua	43	249	292
Mertua	3	18	21
Famili Lain	5.927	5.387	11.314
Pembantu	3	1	4
Lainn`ya	433	887	1.320
Jumlah	145.675	139.411	285.086
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026			

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 14, total populasi Kabupaten Sumba Timur sebesar 285.086 jiwa (terdiri dari 145.675 Laki-laki dan 139.411 Perempuan) terbagi ke dalam kategori hubungan keluarga sebagai berikut:

Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan yang tidak mempunyai suami pada umumnya berstatus lajang tapi mempunyai tanggungan keluarga baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda baik karena cerai mati maupun cerai hidup.

Distribusi Kepemimpinan Keluarga (Kepala Keluarga)

- Dominasi Kepala Keluarga Laki-laki: Dari total 79.677 Kepala Keluarga, sebanyak 59.795 Kepala Keluarga (75,05%) dipimpin oleh Laki-laki. Umumnya, Kepala Keluarga laki-laki tinggal bersama pasangan/istrinya (terdata 45.111 orang berstatus Istri).
- Fenomena Kepala Keluarga Perempuan: Terdapat sebanyak 19.882 KK (24,95%) atau sekitar satu perempat dari total rumah tangga di Sumba Timur yang dipimpin oleh Perempuan. Implikasi Sosio-Ekonomi: Kepala Keluarga perempuan ini sebagian besar merupakan perempuan lajang yang memiliki tanggungan keluarga, atau perempuan berstatus janda (baik karena cerai mati maupun cerai hidup). Kategori rumah tangga ini tergolong dalam kelompok rentan secara ekonomi dan memerlukan perhatian khusus dalam program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Kepala Keluarga (KK) didefinisikan sebagai seorang anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau individu yang ditunjuk/dianggap sebagai pemimpin rumah tangga oleh anggota keluarga lainnya. Secara kultural dan sosiologis, struktur masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten Sumba Timur cenderung menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab utama ekonomi sekaligus sebagai Kepala Keluarga.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Tabel 15 - Jumlah Proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kota Waingapu	7.937	2.651	10.588
Haharu	1.620	592	2.212
Lewa	3.655	1.284	4.939
Nggaha Ori Angu	2.493	915	3.408
Tabundung	2.638	951	3.589
Pinu Pahar	1.859	500	2.359
Pandawai	4.132	1.364	5.496
Umalulu	4.193	1.418	5.611
Rindi	2.331	731	3.062
Pahunga Lodu	3.122	1.114	4.236
Wulla Waijilu	1.876	575	2.451
Paberiwai	1.546	490	2.036
Karera	1.935	595	2.530
Kahaungu Eti	2.311	692	3.003
Matawai La Pawu	1.638	509	2.147
Kambara	7.570	2.804	10.374
Kambata Mapambuhang	970	270	1.240
Lewa Tidahu	1.726	510	2.236
Katala Hamu Lingu	944	291	1.235
Kanatang	2.597	796	3.393
Ngadu Ngala	1.463	452	1.915
Mahu	1.239	378	1.617
Total	59.795	19.882	79.677
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026			

Berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2026 yang tercantum pada Tabel 15, total Kepala Keluarga di Kabupaten Sumba Timur tercatat sebanyak 79.677 Kepala Keluarga yang tersebar di 22 kecamatan.

Distribusi Total Kepala Keluarga per Kecamatan

- Kecamatan Terbanyak: Sejalan dengan tingkat kepadatan penduduknya, kecamatan yang memiliki jumlah Kepala Keluarga terbanyak adalah Kota Waingapu yakni sebanyak 10.588 Kepala Keluarga (13,29%), disusul secara ketat oleh Kecamatan Kambara sebanyak 10.374 Kepala Keluarga (13,02%). Kedua wilayah perkotaan ini menampung lebih dari 26,3% dari total rumah tangga di seluruh Kabupaten.
- Kecamatan Terkecil: Sebaliknya, wilayah dengan jumlah Kepala Keluarga paling sedikit berada di Kecamatan Katala Hamu Lingu sebanyak 1.235 KK (1,55%) dan Kambata

Mapambuhang sebanyak 1.240 KK (1,56%)

- Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Sumba Timur dipimpin oleh laki-laki, yakni sebanyak 59.795 KK (75,05%).
- Konsentrasi Wilayah: Jumlah KK laki-laki terbanyak berada di Kota Waingapu sebanyak 7.937 KK (9,96%), diikuti oleh Kampera sebanyak 7.570 KK (9,50%), Umalulu sebanyak 4.193 KK (5,26%) dan Pandawai sebanyak 4.132 KK (5,19%).
- Jumlah Terendah: KK laki-laki paling sedikit tercatat di Katala Hamu Lingu yaitu sebanyak 944 KK (1,18%) dan Kambata Mapambuhang sebanyak 970 KK (1,22%).

d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok umur

Informasi mengenai struktur dan distribusi kelompok umur dari Kepala Keluarga (KK) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat fundamental. Pengetahuan mengenai usia Kepala Keluarga tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat kematangan dan ketahanan rumah tangga, tetapi juga menjadi pijakan utama dalam analisis kondisi demografi serta perencanaan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar daerah.

Tabel 16 - Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Kepala Keluarga		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
15-19	101	97	198	0,25
20-24	1.072	1.016	2.088	2,62
25-29	3.308	2.086	5.394	6,77
30-34	5.699	2.002	7.701	9,67
35-39	7.374	1.485	8.859	11,12
40-44	7.678	1.424	9.102	11,43
45-49	7.252	1.437	8.689	10,91
50-54	6.795	1.490	8.285	10,40
55-59	5.580	1.552	7.132	8,95
60-64	4.721	1.622	6.343	7,96
65-69	3.817	1.721	5.538	6,95
70-74	2.718	1.471	4.189	5,26
>75	3.667	2.468	6.135	7,70
	59.782	19.871	79.653	100

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Pertama Tahun 2026 pada Tabel 16, total Kepala Keluarga yang terdata menurut rincian kelompok umur adalah sebanyak 79.653 KK (terdiri dari 59.782 KK Laki-laki dan 19.871 KK Perempuan). Dari struktur data tersebut, dapat ditarik beberapa poin analisis mendalam sebagai berikut :

- Kelompok Umur Tertinggi: Proporsi Kepala Keluarga terbesar di Kabupaten Sumba Timur berada pada rentang kelompok umur 40–44 tahun, yaitu sebanyak 9.102 KK (11,43%).
- Kelompok Umur Tertinggi Laki-Laki: Pada kelompok Kepala Keluarga laki-laki, rentang umur 40–44 tahun juga menjadi puncaknya dengan jumlah terbanyak yaitu 7.678 KK (mencakup 12,84% dari total KK laki-laki atau 9,64% dari seluruh KK).
- Konsentrasi Usia Produktif Matang (35–54 Tahun): Secara akumulatif, kelompok umur produktif matang (35–54 tahun) mencakup 34.935 KK atau 43,88% dari total Kepala Keluarga. Struktur ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Sumba Timur dikepalai oleh individu yang berada pada puncak usia produktif dan kematangan ekonomi, di mana beban tanggungan keluarga (biaya pendidikan anak dan operasional rumah tangga) berada pada titik tertinggi.
- Puncak Proporsi Perempuan Kepala Keluarga (>75 Tahun): Berbeda dengan Kepala Keluarga laki-laki yang berpusat pada usia 40–44 tahun, proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi justru berada pada kelompok umur >75 tahun, yaitu mencapai 2.468 jiwa (mencakup 12,42% dari total KK perempuan atau 3,10% dari seluruh KK).
- Indikator Umur Harapan Hidup (UHH): Tingginya jumlah Kepala Keluarga perempuan pada usia lanjut (>75 tahun dan rentang 65–74 tahun) mengindikasikan semakin meningkatnya Angka Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di Kabupaten Sumba Timur, khususnya populasi perempuan.
- Fenomena Janda Lansia: Kondisi ini dipengaruhi oleh fakta demografi di mana perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan laki-laki, sehingga banyak di antara mereka yang ditinggal wafat oleh pasangannya (cerai mati) dan otomatis memegang peran sebagai Kepala Keluarga untuk mengelola rumah tangga lansia atau menanggung anggota keluarga lainnya.
- Kelompok Umur 15–19 Tahun: Terdata sebanyak 198 KK (0,25%), yang terdiri dari 101 KK Laki-laki dan 97 KK Perempuan. Adanya KK pada usia remaja ini mencerminkan fenomena pernikahan usia dini atau remaja yang terpaksa menjadi penanggung jawab rumah tangga secara mandiri.
- Kelompok Umur 20–24 Tahun: Terdata sebanyak 2.088 KK (2,62%) (1.072 KK Laki-laki dan 1.016 KK Perempuan). Kategori ini mencerminkan pasangan muda yang mulai membangun keluarga baru dan membutuhkan akses pendampingan ekonomi serta layanan kesehatan keluarga awal.
- Total Kepala Keluarga berstatus lansia (usia 60 tahun ke atas) mencakup 22.205 KK atau sekitar 27,88% dari total seluruh

Kepala Keluarga (terdiri dari 14.924 KK Laki-laki dan 7.281 KK Perempuan). Jumlah KK lansia yang mencapai lebih dari seperempat populasi rumah tangga ini membutuhkan perhatian khusus dalam skema jaminan dan perlindungan sosial.

e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai Kepala Keluarga (KK) menurut status bekerja dan jenis pekerjaan sangat krusial untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk serta pengentasan kemiskinan.

Tabel 17 - Kepala Keluarga Berdasarkan Status Bekerja & Jenis Pekerjaan			
Jenis Pekerjaan	Kepala Keluarga		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum Bekerja	2.711	1.951	4.662
Mengurus Rumah Tangga	1	2.821	2.822
Pelajar/Mahasiswa	1.206	1.172	2.378
Pensiunan	1.153	310	1.463
Bekerja	22.650	22.650	68.352
Jumlah	27.721	28.904	79.677
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.			

Status pekerjaan Kepala Keluarga (KK) merupakan indikator utama dalam mengukur ketahanan ekonomi dan merencanakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Data DKB Dukcapil Sumba Timur Semester Pertama tahun 2026 mencatat dari total 79.677 KK, mayoritas KK telah bekerja sebanyak 68.352 KK (85,79%). Di sisi lain, terdapat 4.662 KK (5,85%) tidak/belum bekerja, 2.822 KK (3,54%) mengurus rumah tangga yang didominasi perempuan, 2.378 KK (2,98%) pelajar/mahasiswaserta 1.463 KK (1,84%) pensiunan.

Keberadaan 4.662 KK yang belum bekerja dan tingginya KK perempuan yang mengurus rumah tangga memerlukan intervensi khusus dari pemerintah daerah. Kebijakan strategis harus difokuskan pada perluasan lapangan kerja, pelatihan keterampilan vokasi dan pemberdayaan ekonomi inklusif guna meningkatkan kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga rentan secara mandiri.

f. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan Kepala Keluarga (KK) merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia yang mencerminkan status sosial-ekonomi serta kapasitas ketahanan keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan KK, semakin besar peluang dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 18 - Karakteristik Kepala Keluarga menurut tingkat Pendidikan

Pendidikan	Kepala Keluarga		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum Sekolah	9.306	3.933	13.239
Belum Tamat SD/Sederajat	1.712	725	2.437
Tamat SD/Sederajat	23.899	7.366	31.265
SLTP/Sederajat	6.204	2.226	8.430
SLTA/Sederajat	13.154	4.000	17.154
Diploma I/II	309	89	398
Akademi/Diploma III/S.Muda	763	317	1.080
Diploma IV/Strata I	4.256	1.198	5.454
Strata II	180	28	208
Strata III	12	0	12
Jumlah	59.795	19.882	79.677
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.			

Tingkat pendidikan Kepala Keluarga berbanding lurus dengan status sosial ekonomi dan kapasitas kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan data DKB Dukcapil Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama tahun 2026, mayoritas Kepala Keluarga berpendidikan dasar Tamat SD/Sederajat sebanyak 31.265 Kepala Keluarga (39,24%), disusul jenjang SLTA/Sederajat sebanyak 17.154 Kepala Keluarga (21,53%) dan Tidak/Belum Sekolah sebanyak 13.239 Kepala Keluarga (16,62%). Sementara itu, Kepala Keluarga yang menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma hingga Strata III) secara akumulatif baru mencapai 7.152 Kepala Keluarga (8,98%) dari total 79.677 Kepala Keluarga.

Tingginya proporsi Kepala Keluarga berpendidikan rendah SD ke bawah sebanyak 47.301 atau 58,92% berpotensi membatasi tingkat pendapatan keluarga dan akses terhadap peluang ekonomi produktif. Kondisi ini memerlukan intervensi kebijakan daerah melalui peningkatan akses pendidikan bagi generasi penerus, program keaksaraan/kejar paketserta pelatihan keterampilan vokasi guna memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

6. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk karena indikator-indikator kelahiran ini berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak. Kelahiran atau fertilitas merupakan satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk disamping penduduk pindah datang. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, seperti pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, kebutuhan sandang dan lain sebagainya. Di masa depan mereka



akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang membutuhkan pendidikan dan kemudian akan masuk pada angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Bayi perempuan akan tumbuh menjadi remaja dan memasuki usia subur yang akan menikah dan melahirkan. Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran adalah jumlah kelahiran. Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Selain itu data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, bahwa pada Semester Pertama Tahun 2026 terjadi kelahiran sebanyak 2.146 Jiwa, jumlah bayi kelahiran hidup sebanyak 2.121 Jiwa, bayi lahir meninggal kematian endogen/neonatal) sebanyak 25 Jiwa, kematian eksogen atau kematian post neo-natal sebanyak 7 jiwa, kematian Balita (usia 0 thn s/d 5 thn – 1 hari) sebanyak 34 orang, anak meninggal (usia 1 thn/d 5 thn-1hari) sebanyak 2 orang, kematian bayi usia 0 bln s/d 1 thn-1hr (IMR) sebanyak 32 orang. Kematian endogen/neonatal adalah kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, sedangkan kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal adalah kematian bayi usia 1 bulan sampai menjelang usia 12 bulan.

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk karena indikator-indikator kelahiran ini berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.

Adapun penyebab kematian bayi yang umum terjadi adalah berat bayi lahir rendah, Asfiksia (gagal napas), kelainan kongenital/kelainan bawaan (terjadi sejak kehamilan) dan pneumonia.

Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran, salah satunya adalah Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)

- Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.

Angka kelahiran kasar berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Rumusnya :

$$CBR = \frac{B}{P} \times K$$

B = Banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu

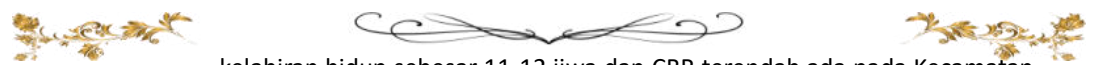
K = Konstanta = 1000

P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu

Tabel 19 - Angka Kelahiran Kasar

Kecamatan	Jumlah Kelahiran hidup	Jumlah Penduduk	CBR
Kota Waingapu	230	37.649	6,1
Haharu	55	7.376	7,4
Lewa	153	18.212	8,4
Nggaha Ori Angu	97	11.363	8,5
Tabundung	80	10.577	7,5
Pinu Pahar	54	8.257	6,5
Pandawai	154	20.530	7,5
Umalulu	152	20.892	7,2
Rindi	108	11.710	9,2
Pahunga Lodu	114	15.642	7,2
Wulla Waijilu	69	9.087	7,5
Paberiwai	43	7.201	5,9
Karera	87	9.199	9,4
Kahaungu Eti	94	10.870	8,6
Matawai La Pawu	47	7.358	6,3
Kambora	221	36.988	5,9
Kambata Mapambuhang	32	4.595	6,9
Lewa Tidahu	49	8.452	5,7
Katala Hamu Lingu	51	4.761	10,7
Kanatang	107	12.840	8,3
Ngadu Ngala	61	6.157	9,9
Mahu	63	5.370	11,7
TOTAL	2.121	285.086	7,4
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026 & Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur			

Pada tabel 19 Menunjukkan Angka Kelahiran Kasar yang terjadi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur keadaan Semester Pertama tahun 2026. Angka Kelahiran Kasar/CBR tertinggi ada pada Kecamatan Mahu sebesar 11,7 yang berarti disetiap 1000 penduduk terjadi



kelahiran hidup sebesar 11-12 jiwa dan CBR terendah ada pada Kecamatan Lewa Tidahu yaitu 5,7 yang berarti di Kecamatan Lewa Tidahu terjadi kelahiran hidup sebanyak 5-6 jiwa di setiap 1000 penduduk. Tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Kelahiran Kasar/CBR di Kabupaten Sumba Timur sebesar 7,4 yang artinya bahwa dari 1000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 7 kelahiran hidup.

7. Kematian (Mortalitas)

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk di suatu wilayah bukan saja akan mempengaruhi pertumbuhan, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Indikator kematian berguna untuk memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kematian dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur dan lain-lain. Kematian juga bisa diakibatkan oleh penyakit menular, kecelakaan dan gaya hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Akta Kematian dan dihapus datanya dari database kependudukan. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kematian bagi warga masyarakat yang telah meninggal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur telah melakukan suatu terobosan dengan menciptakan Inovasi dengan Branding “JEMPOL CAMAT” (Jemput Bola Pencatatan Kematian), dimana petugas Disdukcapil secara aktif mendatangi rumah duka untuk menjemput data pendukung sesuai persyaratan sebagai bahan pengurusan Akta Kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur terus menghimbau masyarakat agar melaporkan setiap peristiwa kematian jika ada anggota keluarga yang meninggal.

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate)

Angka kematian kasar merupakan angka yang menunjukan besarnya kematian pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Angka kematian kasar dihitung dengan rumus :

$$\text{CDR} = \frac{D}{P} \times K = \frac{1.078}{285.086} \times 1000 = 3,7$$

D = Banyaknya kematian

P = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun

K = Konstanta = 1000

CDR = Angka Kematian Kasar

Dari rumus diatas menunjukan angka kematian kasar pada pertengahan tahun 2026 di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 3, artinya bahwa dari 1000 penduduk Kabupaten Sumba Timur terjadi kematian sebanyak 3 orang per Januari – Juni 2026 (keadaan Semester Pertama).

B. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan pijakan utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui dimensi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Pada dimensi kesehatan, indikator kelahiran (fertilitas) menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak.

1. Kesehatan

Berikut gambaran penduduk berdasarkan kualitas penduduk Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

a. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator- indikator kelahiran ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dari perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak

b. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun di suatu tempat dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.

Rumus:

$$\text{CWR} = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}} \times K = \frac{13.526}{75.719} \times 100 = 17,86$$

Keterangan:

P0-4 = Jumlah Penduduk usia di bawah 5 tahun (0-4 tahun)

P15-49 = Jumlah Penduduk perempuan usia 15-49 tahun

K = Konstanta = 100

Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio anak dan perempuan di Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026 adalah sebesar 17,86 yang berarti bahwa pada Semester Pertama Tahun 2026 terdapat 17-18 anak di bawah usia 5 Tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun.

Tabel 20 - Rasio Anak dan Perempuan (CWR)

Kecamatan	Perempuan Usia 15-49 Tahun	Penduduk Usia 0-4 Tahun	CWR
KOTA WAINGAPU	10.395	2.071	19,92
HAHARU	1.999	471	23,56
LEWA	4.948	1.083	21,89
NGGAHA ORI ANGU	3.099	721	23,27
TABUNDUNG	2.800	496	17,71
PINU PAHAR	2.098	401	19,11
PANDAWAI	5.510	1.293	23,47
UMALULU	5.582	1.127	20,19
RINDI	3.168	609	19,22
PAHUNGA LODU	4.282	921	21,51
WULLA WAIJILU	2.498	511	20,46
PABERIWAI	1.800	376	20,89
KARERA	2.498	447	17,89
KAHAUNGU ETI	2.927	670	22,89
MATAWAI LA PAWU	1.898	393	20,71
KAMBERA	10.282	1.986	19,32
KAMBATA MAPAMBUHANG	1.194	277	23,20
LEWA TIDAHU	2.273	481	21,16
KATALA HAMU LINGU	1.323	273	20,63
KANATANG	3.581	837	23,37
NGADU NGALA	1.588	304	19,14
MAHU	1.258	317	25,20
TOTAL	77.001	16.065	20,86

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Indikator Child Women Ratio (CWR) mengukur tingkat fertilitas serta kecenderungan laju pertumbuhan penduduk usia dini. Berdasarkan data DKB Dukcapil Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama tahun 2026, angka CWR Kabupaten berada pada 20,86, yang berarti terdapat sekitar 20 hingga 21 anak balita (0–4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia subur (15–49 tahun). Rasio CWR tertinggi tercatat di Kecamatan Mahu (25,20) dan Haharu (23,56), sedangkan rasio terendah berada di Kecamatan Tabundung (17,71) dan Karera (17,89).

Angka CWR yang relatif terkendali ini mengindikasikan keberhasilan awal program Keluarga Berencana (KB) di daerah. Namun, variasi CWR antar-kecamatan memerlukan perhatian khusus pada pemetaannya. Pemerintah daerah perlu memfokuskan layanan kesehatan ibu

dan anak (KIA), penyediaan fasilitas Posyanduserta pemenuhan gizi balita pada kecamatan dengan angka CWR tinggi guna menekan risiko stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus.

c. Jumlah penduduk menurut Golongan Darah

Pencatatan jenis golongan darah dan rhesus penduduk sangat penting untuk mendukung pelayanan medis darurat (transfusi darah), penanganan masalah kehamilan, identifikasi forensikserta mencegah risiko komplikasi donor.

Alasan dari perlunya kita mengetahui jenis golongan darah:

- 1) Mencegah respon berbahaya, seperti saat kita menerima donor dari golongan darah yang tidak sesuai dapat menimbulkan respon yang membahayakan tubuh.
- 2) Memudahkan dokter dan tenaga medis saat menangani keadaan gawat darurat.
- 3) Mencegah masalah kemamilan, sebab pasangan yang memilki rhesus darah berbeda dapat menimbulkan masalah kehamilan.

Tabel 21 - Jumlah penduduk menurut golongan darah

Tabel 21 - Jumlah penduduk menurut golongan darah													
Kecamatan	GOLONGAN DARAH												
	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU
KOTA WAINGAPU	1.892	2.799	617	5.310	12	5	19	8	7	4	24	56	26.896
HAHARU	90	141	34	224	3	0	0	0	1	3	7	11	6.862
LEWA	361	573	127	1.163	1	2	5	1	3	2	14	26	15.934
NGGAHA ORI ANGU	225	257	64	445	0	0	0	1	0	3	4	16	10.348
TABUNDUNG	147	267	86	376	0	0	1	0	0	0	0	8	9.692
PINU PAHAR	49	103	33	140	1	1	0	0	1	1	6	21	7.901
PANDAWAI	285	753	146	923	1	0	8	1	2	2	8	37	18.364
UMALULU	246	516	104	793	6	1	13	3	1	7	11	36	19.155
RINDI	75	164	38	332	1	2	2	3	0	0	1	18	11.074
PAHUNGA LODU	163	353	64	521	1	1	5	2	0	1	9	19	14.503
WULLA WAJILU	84	182	30	225	1	1	2	1	1	2	4	8	8.546
PABERIWAI	58	99	15	104	3	1	0	0	3	0	2	16	6.900
KARERA	73	137	23	205	0	0	3	4	2	3	1	15	8.733
KAHAUNGU ETI	110	142	48	257	2	0	0	1	3	1	2	8	10.296
MATAWAI LA PAWU	51	97	25	138	0	0	2	1	0	0	3	15	7.026
KAMBERA	1.527	3.175	578	4.037	9	1	6	9	8	6	21	80	27.531
KAMBATA MAPAMBUHANG	55	71	18	98	0	0	0	0	0	1	0	3	4.349
LEWA TIDAHU	102	153	41	305	0	1	2	0	2	0	6	8	7.832
KATALA HAMU LINGU	70	128	24	150	0	0	0	0	1	0	2	3	4.383
KANATANG	452	559	115	999	6	0	3	1	4	0	6	17	10.678
NGADU NGALA	42	89	17	99	0	0	1	0	0	1	3	9	5.896
MAHU	19	34	3	63	0	0	0	0	0	1	1	6	5.243
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026													

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Pencatatan jenis golongan darah dan rhesus merupakan indikator penting dalam kesiapsiagaan layanan kesehatan darurat, manajemen donor darahserta penanganan risiko klinis reproduksi. Berdasarkan data DKB Dukcapil Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama tahun 2026, dari penduduk yang telah teridentifikasi golongan darahnya, kelompok terbesar adalah Golongan Darah O

sebanyak 16.919 jiwa (6,08%), disusul B sebanyak 10.817 jiwa (3,89%), A sebanyak 6.192 jiwa (2,23%) dan AB sebanyak 2.256 jiwa (0,81%). Sementara itu, populasi dengan data spesifik rhesus (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-) secara akumulatif tercatat sebanyak 787 jiwa (0,28%).

Temuan utama dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk, yakni 241.144 jiwa (86,71%), masih berada pada kategori Tidak Tahu golongan darahnya. Tingginya proporsi ini menjadi tantangan serius bagi efisiensi penanganan medis darurat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan program pemeriksaan dan perekaman golongan darah secara masif yang terintegrasi dengan pelayanan administrasi kependudukan dan fasilitas kesehatan dasar.

d. Kasus gizi buruk dan gizi kurang dan Ibu Hamil kekurangan Gizi

Gizi Buruk adalah kekurangan energy dan protein (KEP) tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu yang lama yang ditandai dengan status gizi sangat buruk. Sedangkan masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi) dan lain-lain.

Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita disuatu daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur (pada 24 Puskesmas) dalam Semester Pertama Tahun 2026, kasus gizi buruk di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 327 jiwa, tersebar di 21 kecamatan. Kasus gizi buruk terbesar berada di Kecamatan Umalulu sebesar 45 kasus, disusul Kecamatan Kampera dan Pahunga Lodu sebesar 43 kasus dan hanya 1 Kecamatan yang bebas gizi buruk yaitu Kecamatan Katala Hamu Lingu. Secara keseluruhan kasus gizi buruk mengalami kenaikan sebanyak 34 kasus dibandingkan dengan keadaan Tahun 2025.

Untuk Kasus Gizi Kurang, ada 3.016 kasus di Kabupaten Sumba Timur yang juga tersebar di 22 kecamatan. Kasus tertinggi terdapat di Kecamatan Umalulu dengan 399 kasus, disusul Kecamatan Pandawai sebesar 337 kasus dan kasus terendah terdapat di Kecamatan Ngadu Ngala dengan 34 kasus. Secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 131 kasus dibanding dengan tahun 2025.

Untuk kasus Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (BUMIL KEK) ada 710 kasus yang juga tersebar di 22 Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur dan kasus terbesar di Kecamatan Umalulu sebesar 55 kasus, disusul Kecamatan Rindi sebanyak 52 kasus, sedangkan kasus terkecil pada Kecamatan Kambata Mapa Mbuahang yaitu sebanyak 10 kasus.

Sedangkan untuk kasus ibu melahirkan meninggal terdapat 2 kasus. Penyebab Ibu melahirkan meninggal, adalah karena pendarahan, Pre Eklamsia dan kelainan pembekuan darah (Koagulopati)

Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita disuatu daerah.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengurangi terjadinya kematian bayi dan kematian ibu melahirkan adalah :

- Adanya kegiatan pendampingan dokter ahli pada 24 Puskesmas tentang penanganan pendarahan, asfiksia (kekurangan oksigen pada otak), pendalaman skrining Pre Eklamsia, tanda – tanda bahaya pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, skrining pada bayi baru lahir
- Puskesmas harus mengirim video real emergency tiap minggu yang akan diperiksa oleh dokter ahli dan Dinas Kesehatan
- Pengadaan alat-alat yang dibuthkan oleh Puskesmas
- Pelatihan menggunakan alat medis
- Workshop tentang afiksia bersama dokter ahli.

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam menangani kasus stunting dan gizi buruk antara lain:

1. Program Gerakan Orang tua Asuh adalah gerakan bersama yang menjadi tanggung jawab pribadi para pejabat pemerintahan di Kabupaten Sumba Timur untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting dan gizi buruk.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam tanaman apotik hidup.
3. Peningkatan gizi anak melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Dengan adanya kasus-kasus seperti tersebut diatas, diharapkan peranan pemerintah untuk menaggulangi kondisi tersebut dengan terus membuat program dan kegiatan yang berpihak pada masyarakat khususnya dalam hal meningkatkan derajat kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

e. Kematian (Mortalitas)

a. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate/NNDR) dan Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/Post Neo Natal Death Rate/PNNDR)

Kematian Neonatal atau Kematian Endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Kematian Neonatal atau

Kematian Endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan. Sedangkan Kematian Post Neo Natal adalah kematian yang terjadi pada bayi berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun

Tabel 22 - Angka Kematian Neonatal (NDDR) dan Post Neo Natal

Kecamatan	Kelahiran Hidup	Kematian Neonatal	AK Neonatal / NDDR	Kematian Post Neonatal	AK Post Neonatal/ PNDDR
Kota Waingapu	230	4	17,39	0	0
Haharu	55	1	18,18	0	0
Lewa	153	1	6,53	2	13,07
Nggaha Ori Angu	97	5	51,54	1	10,30
Tabundung	80	1	12,5	1	12,5
Pinu Pahar	54	0	0	0	0
Pandawai	154	1	6,49	1	6,49
Umalulu	152	2	13,15	0	0
Rindi	108	0	0	0	0
Pahunga Lodu	114	1	8,77	1	8,77
Wulla Waijilu	69	0	0	0	0
Paberiwai	43	1	23,25	0	0
Karera	87	0	0	0	0
Kahaungu Eti	94	1	10,63	0	0
Matawai La Pawu	47	1	21,27	0	0
Kambera	221	3	13,57	0	0
Kambata Mapambuhan g	32	1	31,25	0	0
Lewa Tidahu	49	0	0	1	20,40
Katala Hamu Lingu	51	0	0	0	0
Kanatang	107	0	0	0	0
Ngadu Ngala	61	2	32,78	0	0
Mahu	63	0	0	0	0
TOTAL	2,121	25	11,78	7	3,30

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Dalam Tabel 22 menunjukkan bahwa dari 1000 bayi kelahiran hidup Semester Pertama Tahun 2026 terjadi Kematian Neonatal sebanyak 25 bayi atau terdapat 11 Angka Kematian Neonatal dari 1000 bayi kelahiran hidup dan terjadi kematian Post Neonatal sebanyak 7 kasus dengan Angka Kematian Post Neo Natal sebanyak 3 bayi dari 1000 bayi kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 terjadi sedikit penurunan bayi baru lahir meninggal (Neonatal).

b. Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 selama tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, bahwa pada tenggang waktu Semester Pertama 2026 terdapat kematian Balita di wilayah Kabupaten Sumba Timur sebanyak 34 (tiga puluh empat) balita. Dibandingkan dengan keadaan Semester Dua Tahun 2025 sebesar 43 balita sehingga terjadi penurunan angka kematian Balita di wilayah Kabupaten Sumba Timur sebanyak 9 balita.

Tabel 23 - Angka Kematian Balita

Kecamatan	Penduduk Usia 0-4 tahun pada pertengahan tahun	Kematian Balita (0-4 tahun)	Angka Kematian Balita (AKABA)
Kota Waingapu	1,605	4	2,5
Haharu	512	1	2
Lewa	1.253	3	2,4
Nggaha Ori Angu	954	6	6,3
Tabundung	670	2	3
Pinu Pahar	560	0	0
Pandawai	1.542	2	1,3
Umalulu	1.444	2	1,4
Rindi	975	0	0
Pahunga Lodu	1.424	2	1,4
Wulla Waijilu	719	0	0
Paberiwai	576	1	1,7
Karera	712	0	0
Kahaungu Eti	925	1	1,1
Matawai La Pawu	553	1	1,8
Kambara	2.198	3	1,4
Kambata	354	1	2,8
Mapambuhang			
Lewa Tidahu	527	2	3,8
Katala Hamu Lingu	453	1	2,2
Kanatang	1.071	0	0

Kecamatan	Penduduk Usia 0-4 tahun pada pertengahan tahun	Kematian Balita (0-4 tahun)	Angka Kematian Balita (AKABA)
Ngadu Ngala	540	2	3,7
Mahu	585	0	0
TOTAL	20.152	34	1,7
Sumber Data: DKB Dukcapil dan DinKes Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026			

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Angka Kematian Balita (AKABA) adalah sebesar 1,7 yang artinya bahwa pada semester pertama Tahun 2026 di Kabupaten Sumba Timur terjadi kasus kematian balita sebanyak 1-2 balita di antara 1000 balita yang hidup.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun kehidupan seseorang. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan umumnya juga dijadikan tolak ukur kualitas hidup seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh semakin baik kualitas sumber daya manusia tersebut.

➤ Angka Putus Sekolah (APS)

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun kehidupan seseorang. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan umumnya juga dijadikan tolak ukur kualitas hidup seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh semakin baik kualitas sumber daya manusia tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu kemampuan berpikir yang dimiliki anak, latar belakang pendidikan orang tua yang kurang memahami pentingnya pendidikan, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lemahnya ekonomi keluarga, kurangnya motivasi dan minat anak untuk bersekolah, anak mengidap penyakit atau penyandang disabilitas, tinggal di tempat terpencil jauh dari tempat bersekolah dan juga kondisi lingkungan anak serta pernikahan pada usia sekolah.

Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, jumlah siswa putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP data semester pertama tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 24 - Angka Putus Sekolah (APS)

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Murid Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APS)
SD	33.901	61	0,17 %
SLTP	15,996	245	1,53 %
Jumlah	49,897	306	0,61 %

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Dari Tabel tersebut di atas, terlihat bahwa angka putus sekolah pada tingkat pendidikan SD sebesar 0,17 % sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP sebesar 1,53%. Dengan demikian maka terlihat bahwa Angka Putus Sekolah terbesar pada tingkat pendidikan SMP.

➤ **Angka Partisipasi Kasar**

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Dalam hal ini meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang Pendidikan. Adapun Angka Partisipasi Kasar pada tingkat Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 25 - Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD	33.901	34,364	98,65 %
SLTP	15,996	17,802	89,85 %
Jumlah	49,897	52,166	95,65 %

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Tabel diatas terlihat bahwa untuk setiap jenjang pendidikan dibawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa anak usia sekolah baik tingkat SD maupun SMP bersekolah sesuai dengan usia standar pada jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan atau yang sesuai dengan standar kelompok umur.

➤ **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat Pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indicator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang Pendidikan. Namun APM merupakan indicator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang Pendidikan sesuai dengan standar kelompok umurnya

Tabel 26 - Angka Partisipasi Murni (APM)

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)
SD	33.901	34,364	98,65 %
SLTP	15,996	17,802	89,85 %
Jumlah	49,897	52,166	95,65 %

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Pada Tabel diatas terlihat bahwa APM untuk jenjang Pendidikan SD/Sederajat adalah 98,65% yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun(usia sekolah) terdapat 98 anak yang bersekolah di bangku SD/Sederajat. Sedangkan di bangku SMP/Sederajat APM sekolah yakni 89,85% yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun terdapat 89 orang yang bersekolah di SMP/Sederajat.

3. Ekonomi

- 1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan menganggur/Pencari Kerja)

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga Kerja (Manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Berdasarkan DKB Semester Pertama Tahun 2026, maka jumlah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) sebesar 191.277 jiwa. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Cara Menghitung Persentase Tenaga Kerja :

- Jumlah penduduk usia kerja (15-64) tahun : 191.277 jiwa
- Jumlah penduduk : 285.086 jiwa

Persentase Tenaga Kerja di Kabupaten Sumba Timur sebesar :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia Kerja 15-64 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$
$$\frac{191.277}{285.086} \times 100 = 67,09\%$$

Persentase Tenaga Kerja di Kabupaten Sumba Timur pada pertengahan Tahun 2026 (keadaan 30 Juni 2026) adalah sebesar 67,09%, yang berarti di setiap 100 penduduk ada 67 jiwa yang merupakan usia kerja.

Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran kerja juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan kerja, maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula.

Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut Kelompok pekerjaan menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut kelompok pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut kelompok pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Tabel 27 - Jumlah Penduduk menurut Kelompok Pekerjaan

Kecamatan	BELUM / TIDAK BEKERJA	APARATUR / PEABAT NEGARA	TENAGA KERJA	WIRA SWASTA	PERTANIAN / PETERNAKAN	NELAYAN	AGAMA DAN KEPERAWATAN	PELAJAR/ MAHASISWA	TENAGA KESEHATAN	PENSIUNAN	LAIN LAIN
KOTA WAINGAPU	10.619	2.017	345	2.030	4.093	726	69	10.272	103	694	6.681
HAHARU	1.957	82	14	61	2.816	10	5	2.057	4	15	355
LEWA	4.402	289	101	209	6.179	1	19	5.597	18	77	1.320
NGGAHA ORI ANGU	2.734	110	15	76	4.739	0	10	3.215	3	11	450
TABUNDUNG	2.461	101	26	85	4.540	0	8	2.915	7	28	406
PINU PAHAR	1.969	62	12	46	3.598	0	5	2.271	3	8	283
PANDAWAI	5.343	256	79	244	7.591	76	34	5.816	10	57	1.024
UMALULU	5.160	288	87	457	7.835	73	29	5.671	24	63	1.205
RINDI	2.821	115	24	101	4.610	156	11	3.357	2	13	500
PAHUNGA LODU	4.101	175	51	124	6.124	61	10	4.362	5	44	585
WULLA WAIJILU	2.505	109	36	62	3.564	10	16	2.402	8	20	355
PABERWAI	1.732	61	17	54	2.741	0	4	2.285	0	16	291
KARERA	2.433	74	23	84	3.265	224	10	2.496	3	13	574
KAHAUNGU ETI	2.973	54	12	69	4.423	0	14	2.933	3	4	385
MATAWAI LA PAWU	1.809	80	11	57	2.888	0	9	2.117	1	4	382
KAMBERA	9.841	1.822	306	964	8.525	45	65	10.395	76	538	4.411
KAMBATA MAPAMBUHANG	1.224	15	7	24	1.588	0	1	1.316	3	1	416
LEWA TIDAHU	1.920	88	25	50	3.296	1	8	2.638	1	8	417
KATALA HAMU LINGU	1.284	37	7	22	1.835	0	1	1.286	1	6	282
KANATANG	3.163	370	81	207	3.216	63	12	3.955	15	50	1.708
NGADU NGALA MAHU	1.425	32	13	27	2.743	0	8	1.735	1	4	169
	1.667	19	2	20	2.249	0	2	1.312	1	3	95
TOTAL	73.543	6.256	1.294	5.073	92.458	1.446	350	80.403	292	1.677	22.294

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Rekapitulasi Sektor Pekerjaan Utama (Total Penduduk: 285.086 jiwa)

1. Pertanian / Peternakan: 92.458 jiwa (32,43%) — Sektor Primer / Penopang Utama Ekonomi Daerah
2. Pelajar / Mahasiswa: 80.403 jiwa (28,21%) — Angkatan Kerja Potensial Masa Depan
3. Belum / Tidak Bekerja: 73.543 jiwa (25,80%) — Tantangan Penyerapan Tenaga Kerja
4. Sektor Lainnya / Jasa / Perdagangan / ASN: 38.682 jiwa (13,57%)

Menurut data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur, untuk Semester Pertama tahun 2026 Jumlah Tenaga Kerja penduduk Sumba Timur berjumlah 10.088 orang yang terdiri dari laki-laki 6.032 orang dan perempuan 4.056 orang. Jumlah tenaga kerja meningkat pada tahun ini pada kecamatan Kota Waingapu dan kecamatan Kambera disebabkan adanya penambahan kuota tenaga kerja pada PT. Muria Sumba Manis (MSM).

Adapun jumlah Perusahaan di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 487 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor dan khusus untuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) antar negara sebanyak 25 (dua puluh lima) Perusahaan adalah :

- 
- 
- 
- PT. Maharani Tri Utama Mandiri, PT. Genta Karya Sejahtera, PT. Gasindo Buala Sari, PT. Arny Family, PT. Bhakti Unggul Sejahtera, PT. Prima Duta Sejati, PT. Alam Permai Indonesia, PT. Falia Sinatrya Sejati, PT. Esdema Mandiri, PT. Citra Dato Perkasa, PT. Okdo Harapan Mulia, PT. Bahrindo Mahdi, PT. Baham Putra Abadi, PT. Rizaldy Bina Bersama, Sariwarti Agung, PT. Bumi Mayak Asri, PT. Sugih Jaya Sentosa, PT. Selain Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, ada juga Perusahaan penyalur tenaga kerja antar daerah sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu :
- PT. Karya Abadi Timur, PT. Genta Gemilang Abadi, PTdd. Asisten Rumah Indonesia, PT. Argo Abadi Cemerlang, PT. Kharisma Inti Usaha, PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa, PT. Pusat Pelatihan Chava, PT. Sekar

b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur / Pencari Kerja)

Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dengan mendaftarkan diri pada pelaksana penempatan kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Wilayah kerjanya selain antar negara juga antar daerah di Indonesia.

Adapun data pencari kerja keadaan Semester Pertama per 30 Juni 2026 yang terdaftar sebanyak 1.136 orang, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu disebabkan adanya pembukaan lowongan pekerjaan Tambak Udang dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di desa Palakahembi Kecamatan Pandawai.

Adapun penduduk pencari kerja berdasarkan pendidikan dengan perincian :Penduduk pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang terdaftar sebanyak 294 jiwa dengan perincian :

- SMP sebanyak 1 orang : Laki-laki 1 orang
- SMA sebanyak 441 orang : Laki-laki 266 orang, Perempuan 175 orang
- SMK sebanyak 185 orang : Laki-laki 126 orang, Perempuan 59 orang
- D-III sebanyak 84 orang : Laki-laki 31, Perempuan 53 orang
- D-IV sebanyak 8 orang : Laki-laki 4, Perempuan 4 orang
- S1 sebanyak 414 orang : Laki-laki 216, Perempuan 198 orang
- S2 sebanyak 3 orang : Laki-laki 3

Dari rincian di atas pencari kerja terbanyak yang berpendidikan SMA berjumlah 441 orang, pendidikan S1 sebanyak 414 orang dan paling sedikit pendidikan SMP berjumlah 1 orang.

Sedangkan jumlah penduduk pencari kerja berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

- Umur 15-19 tahun sebanyak 234 orang
- Umur 20-24 tahun sebanyak 389 orang
- Umur 25-29 tahun sebanyak 357 orang
- Umur 30-34 tahun sebanyak 125 orang
- Umur 35-39 tahun sebanyak 27 orang
- Umur 40-44 tahun sebanyak 4 orang

Sebagian besar pencari kerja ini berusia 20-24 tahun sebanyak 389 orang, disusul berusia 25-29 tahun sebanyak 357 orang dan yang berusia 15-19 tahun sebanyak 234 orang dan paling sedikit yang berumur 40-44 yaitu hanya 4 orang.

➤ **Persentase Pekerja Anak (<15 Tahun)**

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah.

Khusus di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Semester Pertama Tahun 2026 tidak ada pekerja anak usia sekolah (SD) dibawah umur 15 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak- anak pada usia tersebut lebih mementingkan pendidikan daripada mencari pekerjaan.

2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) mengukur proporsi penduduk usia kerja (15–64 tahun) yang secara aktif terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif (mencakup penduduk yang bekerja dan pencari kerja). Indikator ini merupakan instrumen utama untuk mengukur sejauh mana potensi tenaga kerja daerah terdorong masuk ke dalam pasar kerja.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 28 - Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Kelompok Umur	Tenaga Kerja	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	APAK
		Pencari Kerja	Bekerja	Angkatan Kerja		
15-19	29.003	234	135	3.095	25.908	10,67
20-24	26.680	389	2.289	6.430	20.250	24,1
25-29	24.681	357	8.609	14.624	10.057	59,25
30-34	20.865	125	12.651	16.936	3.929	81,17
35-39	19.639	27	15.887	17.791	1.848	90,59
40-44	17.674	4	14.957	15.682	1.992	88,73
45-49	15.782	0	13.470	13.833	1.949	87,65
50-54	13.693	0	11.613	11.792	1.901	86,12
55-59	11.146	0	9.553	9.660	1.486	86,67
60-64	9.074	0	7.487	7.555	1.519	83,26
Jumlah	188.237	1.136	96.651	117.398	70.839	62,37

Sumber Data: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

Secara keseluruhan, Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kabupaten Sumba Timur pada Semester Pertama tahun 2026 mencapai 62,37%, yang mengindikasikan bahwa sekitar 62 dari setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dari total 188.237 jiwa tenaga kerja usia produktif, sebanyak 117.398 jiwa masuk dalam kategori Angkatan Kerja (terdiri atas 96.651 jiwa bekerja dan 1.136 jiwa pencari kerja), sedangkan 70.839 jiwa tergolong Bukan Angkatan Kerja (seperti kelompok pelajar/mahasiswa dan pengurus rumah tangga).

Berdasarkan distribusi kelompok umur, tingkat partisipasi kerja terendah berada pada kelompok usia muda, yakni usia 15–19 tahun (10,67%) dan 20–24 tahun (24,10%), lantaran sebagian besar masih menempuh jenjang pendidikan formal. Puncak partisipasi angkatan kerja tercapai pada kelompok umur 35–39 tahun (90,59%) dan 40–44 tahun (88,73%), yang merupakan fase usia produktif matang. Adanya pencari kerja pada kelompok usia muda (15–29 tahun) sebanyak 980 jiwa menekankan pentingnya intervensi program pelatihan vokasi, kemitraan dunia usaha/dunia industri (DUDI) serta perluasan lapangan kerja baru yang adaptif bagi angkatan kerja muda daerah.

4. Sosial

1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau sekelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau memiliki gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten

Sumba Timur mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Semester Pertama Tahun 2026 , yakni :

- Anak terlantar sebanyak 100 orang, laki-laki 35 orang Perempuan 65 orang
- Anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 57 orang, laki-laki 21 orang Perempuan 35 orang
- Anak jalanan sebanyak 25 orang, laki-laki 22 orang, Perempuan 3 orang
- Ex Narapidana 44 orang, laki-laki 42 orang, perempuan 2 orang
- Lanjut Usia terlantar sebanyak 29.744 orang, laki-laki : 15.864 orang, Perempuan : 13.880 orang
- Korban bencana alam 76 orang, laki-laki 58 orang, perempuan 18 orang
- Keluarga Fakir Miskin sebanyak 49.726 KK
- Korban Kebakaran rumah 13 KK, laki-laki 11 KK, perempuan 2 KK
- Korban Banjir 15 KK, laki-laki 10 KK, perempuan 5 KK
- Komunitas Adat Terpencil 17 KK, laki-laki 16 KK, perempuan 1 KK
- Korban angin puting beliung 44 KK, laki-laki 35 KK, perempuan 9 KK
- Penyandang cacat Fisik 753 orang, laki-laki 447 orang, perempuan 306 orang
- Penyandang Cacat Mental 349 orang, laki-laki 184 orang, perempuan 165 orang
- Penerima PKH 21.410 jiwa, laki-laki 4.956 orang, perempuan 16.454 orang
- Wanita Rawan Sosial berjumlah 25 orang
- Penyandang cacat sensorik sebanyak 798 orang, laki-laki 469, perempuan 329 orang
- Korban bencana sosial , perempuan sebanyak 1 orang

2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pengertian PSKS pada dasarnya mencakup :

- Potensi Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi dan Lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan diberbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat di dayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan social
- Sumber Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi dan Lembaga yang telah memiliki kemampuan dan atau telah memperoleh pelatihan dan atau

pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya untuk mengatasi dan mengurangi penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial, telah membentuk Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Adapun Jenis-jenis PSKS yaitu :

- Panti Sosial Anak dan remaja, yang menampung penduduk yang sudah tidak mempunyai orang tua sebanyak 166 orang, laki-laki : 80 orang Perempuan : 86 orang
- Panti Cacat, yang menampung penduduk cacat sebanyak 60 orang, laki-laki 31 orang Perempuan 29 orang.
- Tagana sebagai tenaga lapangan sebanyak 40 orang, laki-laki 29 orang, perempuan 11 orang.
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 22 orang, laki-laki 20 orang, perempuan 2 orang
- LSM Nasional berjumlah 50 Lembaga.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait PSKS dan PMKS:

- a. Memberikan layanan sosial langsung kepada PSKS dan PMKS yang meliputi akses layanan alat bantu, akses layanan kesehatan (pemberian rekomendasi JKN KIS), akses layanan pendidikan (memfasilitasi PPKS untuk mengikuti pelatihan kerja di Sentra Efata).
- b. Memberdayakan ekonomi melalui pemberian bantuan usaha perorangan maupun kelompok.

3) Proporsi Penduduk Miskin

Konsep kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda, Kemiskinan didefinisikan sebagai penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan (Rp.443.502,- per kapita per bulan), sedangkan Kemiskinan Ekstrem dengan pendapatan dibawah US\$ 1,99 PPP (Purchasing Power Parities). Pada Tahun 2026 nilai US \$ 1,9 PPP = 347.130 per kapita per bulan.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2026 adalah :

1. Mengurangi beban pengeluaran
2. Meningkatkan pendapatan
3. Meminimalkan kantong kemiskinan

Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem :

- Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh program perlindungan sosial
- Memastikan komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah
- Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas dan lansia
- Melibatkan multipihak, Komunitas, universitas, swasta dan media
- Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terkait Pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan (NIK, Akta Kelahiran, dsb)

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur masih lebih fokus pada mengurangi beban pengeluaran dibandingkan meningkatkan pendapatan. Untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan, sehingga masyarakat miskin dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka Panjang.

Data yang diperoleh dari Sumber BPS Sumba Timur Tahun 2026 Kabupaten Sumba Timur bahwa penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur keadaan Tahun 2026 sebanyak 73.580 jiwa.

4) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti salah satunya kesehatan. Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan dan Pembiayaan kesehatan penduduk biasanya dipenuhi melalui jaminan kesehatan baik bagi penduduk miskin maupun yang bekerja (mampu secara finansial) dan biasanya dipenuhi melalui Asuransi Kesehatan, seperti BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Data yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Waingapu bahwa pemanfaat BPJS yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) keadaan 30 Juni 2026 sebanyak 236.600 jiwa (84,8%) yang berasal dari sumber dana APBN sebanyak 216.874 jiwa (77,7%), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sumber dana APBD/ Jamkesda Kabupaten Sumba Timur sebanyak 19.726 jiwa (7,1%). Sedangkan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) sebanyak 52.433 jiwa (18,8%) yang terdiri dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU)/Mandiri, Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Bukan Pekerja.

Dalam pelayanannya BPJS bekerja sama dengan 4 (empat) Rumah Sakit yang ada di Kota Waingapu, klinik sebanyak 4 (empat) buah dan 24 Puskesmas yang tersebar pada 22 Kecamatan dengan dibantu oleh Dokter Praktek Perorangan (DPP) sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) Optik yaitu Optik Internasional.

Menurut data yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Sumba Timur, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2026 adalah 200.035 jiwa.

Rumus menghitung Jumlah penduduk miskin penerima Jamkeskin adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Penduduk Miskin} = \sum \frac{\text{Penduduk Miskin Penerima Jamkes}}{\text{Penduduk Miskin}} \times 100$$

$$\% \text{ Penduduk Miskin} = \sum \frac{235.957}{200.035} \times 100 = 117,95\%$$

Menurut penjelasan dari BPJS Cabang Waingapu Jumlah penduduk miskin penerima jamkeskin lebih besar dari Jumlah penduduk miskin dikarenakan ada penduduk yang mendaftar di masukkan dalam kategori penduduk miskin (Kelas III) untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah.s

C. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk seperti perbedaan sumber daya tiap daerah. Penduduk melakukan mobiltas untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tersedia di wilayah asal mereka, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti pekerjaan. Mobilitas penduduk mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam hal laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah dan juga mempunyai peran dalam pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan.

Terdapat dua tipe mobilitas penduduk yang biasa dilakukan, yaitu mobilitas permanen yang biasa juga disebut migrasi dan mobilitas non permanen. Ke dua tipe mobilitas ini berpengaruh positif ataupun negatif di daerah asal maupun daerah tujuan.



a. **Mobilitas Permanen (migrasi)**

Mobilitas permanen yang biasa juga disebut dengan migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah administratif , yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain dengan tujuan untuk menetap.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik, yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik terdapat pula faktor antara yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tempat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan lain sebagainya, contohnya Transmigrasi.

Jumlah penduduk yang pindah Keluar dari Kabupaten Sumba Timur untuk Semester Pertama Tahun 2026 sebanyak 112 jiwa dan jumlah penduduk yang pindah datang ke Kabupaten Sumba Timur sebanyak 96 jiwa.

b. **Mobilitas Non Permanen**

Adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan/upah yang lebih besar di tempat yang didatangi karena di daerah asal, lowongan pekerjaan sedikit dan juga upahnya rendah.

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal pengurusan dokumen kependudukan sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diharapkan agar tertib administrasi kependudukannya. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk layanan publik lainnya seperti dibidang pendidikan, Kesehatan, Pertanian, perbankan dan sosial lainnya.

A. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi pengakuan negara atas status keperdataan dan identitas legal penduduk, yang menjadi hak asasi dasar anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan identitas hukum sejak dini sangat krusial untuk mencegah manipulasi identitas, eksploitasi, perdagangan anak serta pekerja di bawah umur.

Semua penduduk tidak terkecuali anak dapat dilakukan pencatatan kelahirannya. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan, Yang merupakan hak identitas sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat Universal terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak. Adapun Data cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-5 Tahun dan 0-17 Tahun sudah cukup meningkat walaupun belum mencapai target nasional. Sedangkan untuk kepemilikan Akta Kelahiran Umum masih jauh dari yang diharapkan atau belum optimal walaupun dari data terlihat bahwa setiap tahun ada peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang sudah mulai memahami manfaat dari memiliki Akta Kelahiran.

Setiap tahun ada peningkatan persentase kepemilikan Akta Kelahiran baik Akta Kelahiran Anak Usia 0-5 Tahun dan usia 0-17 Tahun kurang 1 hari maupun Akta Kelahiran Umum.

Dalam merespons kebutuhan layanan publik yang cepat dan inklusif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur menghadirkan inovasi SIDARLIN (Sistem Informasi Pendaftaran Online). Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan secara mandiri kapan dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor dukcapil melalui jaringan internet atau dengan mendatangi kantor desa/kelurahan untuk dibantu oleh petugas yang sudah dilatih dalam pengajuan permohonan dokumen secara online.

Adapun data kepemilikan Akta Kelahiran dapat dilihat dalam Tabel 29 di bawah ini, yang mana data tersebut adalah data kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-5 Tahun dan usia 0-17 tahun serta Akta kelahiran Umum.

Tabel 29 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 Tahun						
Kecamatan	Jlh Anak Usia 0-5 (31 Des 2025)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jlh Anak Usia 0-5 (30 Juni 2026)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Kota Waingapu	2.855	2.838	99,40	2.682	2.670	99,55
Haharu	592	585	98,82	602	598	99,34
Lewa	1.464	1.454	99,32	1.433	1.424	99,37
Nggaha Ori Angu	932	917	98,39	925	913	98,70
Tabundung	655	642	98,02	664	654	98,49
Pinu Pahar	579	531	91,71	536	504	94,03
Pandawai	1.754	1.729	98,57	1.690	1.668	98,70
Umalulu	1.548	1.539	99,42	1.517	1.513	99,74
Rindi	838	829	98,93	831	827	99,52
Pahunga Lodu	1.281	1.230	96,02	1.261	1.227	97,30
Wulla Waijilu	737	730	99,05	682	677	99,27
Paberiwai	526	516	98,10	509	502	98,62
Karera	655	644	98,32	617	607	98,38
Kahaungu Eti	935	909	97,22	924	912	98,70
Matawai La Pawu	497	488	98,19	529	523	98,87
Kambara	2.684	2.648	98,66	2.575	2.549	98,99
Kambata Mapambuhang	394	377	95,69	385	373	96,88
Lewa Tidahu	682	672	98,53	659	648	98,33
Katala Hamu Lingu	348	343	98,56	367	364	99,18
Kanatang	1.108	1.096	98,92	1.089	1.079	99,08
Ngadu Ngala	451	435	96,45	432	420	97,22
Mahu	467	452	96,79	442	434	98,19
TOTAL	21.982	21.604	98,28	21.351	21.086	98,76

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

Perluasan kepemilikan Akta Kelahiran bagi balita (usia 0–5 tahun) di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan trend yang sangat positif. Berdasarkan data DKB Dukcapil Semester Pertama tahun 2026, tingkat kepemilikan akta kelahiran balita mencapai 98,76% (21.086 anak terdata memiliki akta dari total 21.351 anak), meningkat sebesar 0,48% dibandingkan posisi 31 desember 2025 (98,28%).

Cakupan kepemilikan tertinggi berada di Kecamatan Umalulu (99,74%), Kota Waingapu (99,55%) dan Rindi (99,52%). Sementara itu, persentase kepemilikan terendah tercatat di Kecamatan Pinu Pahar (94,03%) dan Kambata Mapambuhang (96,88%). Keberhasilan pencapaian cakupan hingga mendekati 100% ini didukung oleh efektivitas pemanfaatan inovasi layanan berbasis aplikasi SIDARLIN, integrasi pelayanan di tingkat desa/kelurahanserta program layanan keliling jemput bola secara berkala.

Tabel 30 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun

Kecamatan	Jlh Anak Usia 0-17 (31 Des 2025)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jlh Anak Usia 0-17 (30 Juni 2026)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Kota Waingapu	11.603	11.394	98,2	11.472	11.295	98,46
Haharu	2.293	2.206	96,21	2.303	2.242	97,35
Lewa	5.585	5.399	96,67	5.578	5.419	97,15
Nggaha Ori Angu	3.556	3.424	96,29	3.572	3.452	96,64
Tabundung	3.187	3.033	95,17	3.171	3.040	95,87
Pinu Pahar	2.734	2.526	92,39	2.702	2.517	93,15
Pandawai	6.738	6.517	96,72	6.705	6.516	97,18
Umalulu	6.680	6.565	98,28	6.702	6.604	98,54
Rindi	3.948	3.744	94,83	3.978	3.803	95,6
Pahunga Lodu	5.253	4.925	93,76	5.258	4.967	94,47
Wulla Waijilu	3.025	2.925	96,69	2.965	2.873	96,9
Paberiwai	2.696	2.596	96,29	2.676	2.592	96,86
Karera	3.013	2.858	94,86	2.988	2.851	95,41
Kahaungu Eti	3.741	3.572	95,48	3.759	3.620	96,3
Matawai La Pawu	2.396	2.280	95,16	2.441	2.343	95,99
Kambera	11.242	10.977	97,64	11.146	10.923	98
Kambata Mapambuhang	1.577	1.489	94,42	1.553	1.474	94,91
Lewa Tidahu	2.714	2.629	96,87	2.699	2.619	97,04
Katala Hamu Lingu	1.521	1.494	98,22	1.537	1.518	98,76
Kanatang	4.268	4.160	97,47	4.257	4.173	98,03
Ngadu Ngala	2.027	1.913	94,38	2.017	1.916	94,99
Mahu	2.121	2.024	95,43	2.124	2.039	96
TOTAL	91.918	88.650	96,44	91.603	88.796	96,94

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.

Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0–17 tahun merupakan wujud pemenuhan hak identitas hukum penduduk usia anak hingga remaja. Ketidadaan Akta Kelahiran berisiko menimbulkan berbagai hambatan sosial-hukum, seperti kesulitan mengakses pendidikan formal, risiko perkawinan usia dini, eksploitasi pekerja anak, perdagangan anak (child trafficking), adopsi ilegal serta sengketa hak waris keperdataan.

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0–17 tahun di Kabupaten Sumba Timur tercatat sangat tinggi. Berdasarkan data DKB Semester Pertama Tahun 2026 jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 17 Tahun sebanyak 88,796 atau 96,94 % dari jumlah 91.603 anak, mengalami peningkatan 0,50% dibandingkan kondisi 31 Desember 2025 atau 96,44%. Persentase kepemilikan tertinggi berada di Kecamatan Katala Hamu Lingu (98,76%), Umalulu (98,54%) dan Kota Waingapu (98,46%) sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Pinu Pahar (93,15%) dan Pahunga Lodu (94,47%).

Meskipun secara akumulatif telah melampaui 96%, masih terdapat 2.807 anak usia 0–17 tahun yang belum memiliki dokumen identitas hukum tersebut. Untuk menuntaskan sisa cakupan dan mencegah risiko perkawinan usia dini maupun eksploitasi anak, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah desa/kelurahan, sekolah serta optimalisasi layanan melalui aplikasi SIDARLIN.

Tabel 31 - Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Umum

Kecamatan	Jumlah Penduduk (31 Des 2025)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jumlah Penduduk (30 Juni 2026)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Kota Waingapu	37.445	21.846	58,34	37.649	22.236	59,06
Haharu	7.274	4.120	56,64	7.376	4.264	57,81
Lewa	18.011	10.228	56,79	18.212	10.474	57,51
Nggaha Ori Angu	11.251	6.404	56,92	11.363	6.568	57,8
Tabundung	10.459	5.808	55,53	10.577	5.970	56,44
Pinu Pahar	8.199	4.447	54,24	8.257	4.535	54,92
Pandawai	20.357	12.481	61,31	20.530	12.715	61,93
Umalulu	20.649	12.623	61,13	20.892	12.908	61,78
Rindi	11.566	6.517	56,35	11.710	6.701	57,22
Pahunga Lodu	15.462	8.857	57,28	15.642	9.076	58,02
Wulla Waijilu	9.054	5.440	60,08	9.087	5.500	60,53
Paberiwai	7.142	4.361	61,06	7.201	4.455	61,87
Karera	9.112	5.136	56,37	9.199	5.256	57,14
Kahaungu Eti	10.687	6.205	58,06	10.870	6.421	59,07
Matawai La Pawu	7.228	4.376	60,54	7.358	4.529	61,55

Kecamatan	Jumlah Penduduk (31 Des 2026)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan	Jumlah Penduduk (30 Juni 2026)	Sdh memiliki Akta Kelahiran	% Kepemilikan
Kambera	36.706	21.118	57,53	36.988	21.551	58,26
Kambata Mapambuhang	4.569	2.695	58,98	4.595	2.734	59,5
Lewa Tidahu	8.377	4.749	56,69	8.452	4.855	57,44
Katala Hamu Lingu	4.692	2.681	57,14	4.761	2.762	58,01
Kanatang	12.686	7.427	58,54	12.840	7.617	59,32
Ngadu Ngala	6.081	3.470	57,06	6.157	3.555	57,74
Mahu	5.296	3.168	59,82	5.370	3.266	60,82
TOTAL	282.303	164.157	58,15	285.086	167.948	58,91
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026						

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Umum menggambarkan sejauh mana seluruh lapisan masyarakat usia 0-75 tahun keatas terlindungi secara hukum dalam basis data kependudukan negara. Berbeda dengan kepemilikan akta pada kategori usia anak yang sudah mendekati 100%, tingkat kepemilikan akta kelahiran pada populasi umum masih relatif terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh persepsi awam masyarakat yang menganggap akta kelahiran hanya diperuntukkan bagi anak-anak sekolah atau kebutuhan pendaftaran aparat negara ASN, TNI, POLRI dan untuk keperluan kerja.

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Umum bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan trend peningkatan secara berkesinambungan. Berdasarkan data DKB Dukcapil Semester Pertama tahun 2026 sebanyak 167.948 jiwa (58,91%) dari total 285.086 jiwa penduduk telah memiliki Akta Kelahiran. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,76% dibandingkan posisi 31 Desember 2025 yakni 164.157 jiwa atau 58,15%. Persentase kepemilikan tertinggi berada di Kecamatan Pandawai (61,93%), Paberiwai (61,87%) dan Umalulu (61,78%), sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Pinu Pahar (54,92%) dan Tabundung (56,44%).

Meskipun terus meningkat, masih terdapat 117.138 jiwa (41,09%) penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran, yang mana didominasi oleh kelompok usia dewasa hingga lansia. Rendahnya kepemilikan pada kelompok dewasa/lansia ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan urgensi identitas keperdataan untuk layanan perbankan, jaminan sosial, maupun ibadah keagamaan. Untuk mempercepat pencapaian target nasional, Dinas Dukcapil terus mengakselerasi sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan, mengoptimalkan pendaftaran daring mandiri melalui kanal

SIDARLINserta menggelar pelayanan jemput bola terpadu hingga ke pelosok desa.

B. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2026 sebagai identitas resmi penduduk berusia 0 hingga 17 tahun kurang satu hari yang belum menikah. KIA berfungsi melengkapi perlindungan hukum anak, mempermudah pendaftaran sekolah, akses pelayanan kesehatan di RSUD/Puskesmas, transaksi perbankan, kebutuhan imigrasi serta meminimalisasi risiko perdagangan anak.

Data persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat dilihat dalam Tabel 32 di bawah ini.

Tabel 32 - Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)				
Kecamatan	Jumlah Anak	Belum Memiliki Kia	Sudah Memiliki Kia	Persentase Kepemilikan
Kota Waingapu	10.717	3.380	7.337	68,46
Haharu	2.153	1.092	1.061	49,28
Lewa	5.189	2.655	2.534	48,83
Nggaha Ori Angu	3.338	1.919	1.419	42,51
Tabundung	2.935	1.359	1.576	53,7
Pinu Pahar	2.519	1.277	1.242	49,31
Pandawai	6.308	2.507	3.801	60,26
Umalulu	6.247	2.712	3.535	56,59
Rindi	3.700	2.558	1.142	30,86
Pahunga Lodu	4.877	3.243	1.634	33,5
Wulla Waijilu	2.747	1.472	1.275	46,41
Paberiwai	2.471	1.340	1.131	45,77
Karera	2.771	1.635	1.136	41
Kahaungu Eti	3.464	1.957	1.507	43,5
Matawai La Pawu	2.267	1.118	1.149	50,68
Kambara	10.378	3.708	6.670	64,27
Kambata Mapambuhang	1.446	889	557	38,52
Lewa Tidahu	2.483	1.151	1.332	53,64
Katala Hamu Lingu	1.435	664	771	53,73
Kanatang	3.968	1.633	2.335	58,85
Ngadu Ngala	1.856	1.087	769	41,43
Mahu	1.982	960	1.022	51,56
TOTAL	85.251	40.316	44.935	52,71

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026

Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan kemajuan positif meskipun masih

berada di bawah target nasional 60%. Berdasarkan data DKB Dukcapil Semester Pertama tahun 2026 tingkat kepemilikan KIA mencapai 52,71% (44.935 anak terdata memiliki KIA dari total 85.251 anak), meningkat sebesar 2,10% jika dibandingkan posisi 31 Desember 2025 yakni 50,61%. Kepemilikan tertinggi tercatat di Kecamatan Kota Waingapu (68,46%), Kambera (64,27%) dan Pandawai (60,26%) sedangkan cakupan terendah berada di Kecamatan Rindi (30,86%) dan Pahunga Lodu (33,50%).

Kendati trend kepemilikan terus naik, masih terdapat 40.316 anak (47,29%) yang belum memiliki KIA untuk memenuhi target nasional sebesar 60%. Guna mengakselerasi penerbitan KIA, Dinas Dukcapil memerlukan dukungan penganggaran daerah untuk mengintensifkan sosialisasi di sekolah-sekolah, optimalisasi inovasi layanan daring SIDARLIN serta pelaksanaan pelayanan kolektif jemput bola yang terintegrasi dengan satuan pendidikan PAUD hingga SMP/MTs di seluruh wilayah kecamatan dan menciptakan inovasi yakni kerjasama Dukcapil dan Mitra Usaha tentang pemanfaatan KIA untuk mendapatkan diskon dari mitra usaha yang diberi nama **Pambuhang Na Anakiada**.

C. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk pengakuan legal negara atas pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan. Dokumen ini memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi suami dan istri, menjamin hak-hak keperdataan pasanganserta memberikan kepastian hukum bagi status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, dapat dilihat pada *Tabel 33* di bawah ini.

Kecamatan	Jumlah Status Kawin	Belum Memiliki Akta Perkawinan	Memiliki Akta Perkawinan	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
Kota Waingapu	13.154	3.433	9.721	73,9
Haharu	2.428	1.548	880	36,24
Lewa	6.099	3.144	2.955	48,45
Nggaha Ori Angu	4.033	3.106	927	22,99
Tabundung	3.588	2.090	1.498	41,75
Pinu Pahar	3.016	1.542	1.474	48,87
Pandawai	6.870	3.418	3.452	50,25
Umalulu	6.952	3.108	3.844	55,29
Rindi	3.952	2.716	1.236	31,28
Pahunga Lodu	5.243	3.290	1.953	37,25
Wulla Waijilu	3.129	1.454	1.675	53,53
Paberiwai	2.251	1.272	979	43,49

Kecamatan	Jumlah Status Kawin	Belum Memiliki Akta Perkawinan	Memiliki Akta Perkawinan	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
Karera	3.257	1.477	1.780	54,65
Kahaungu Eti	3.759	2.296	1.463	38,92
Matawai La Pawu	2.362	1.109	1.253	53,05
Kambera	12.187	3.941	8.246	67,66
Kambata Mapambuhang	1.551	884	667	43
Lewa Tidahu	2.912	1.919	993	34,1
Katala Hamu Lingu	1.661	1.178	483	29,08
Kanatang	4.369	1.977	2.392	54,75
Ngadu Ngala	2.058	1.213	845	41,06
Mahu	1.806	1.335	471	26,08
TOTAL	96.637	47.450	49.187	50,9
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026				

Cakupan kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Sumba Timur pada Semester Pertama tahun 2026 mencapai 50,90% (49.187 jiwa dari total 96.637 jiwa penduduk berstatus kawin), naik sebesar 0,99% dibandingkan pada 31 Desember 2025. Persentase kepemilikan tertinggi berada di Kecamatan Kota Waingapu (73,90%) dan Kambera (67,66%), sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Nggaha Ori Angu (22,99%) dan Mahu (26,08%). Data yang disajikan pada tabel tersebut bahwa masih rendah persentase kepemilikan Akta Perkawinan karena data yang disajikan adalah hasil pengolahan data dan penerbitan dokumen Akta Perkawinan dengan menggunakan Aplikasi SIAK baru dilaksanakan sejak Tahun 2013, sedangkan sebelum tahun 2013 pengolahan masih bersifat manual sehingga nomor registernya belum semua terekam dalam database kependudukan.

Masih banyaknya pasangan suami-istri yang belum mengantongi Akta Perkawinan (47.450 jiwa atau 49,10%) dipengaruhi oleh riwayat pencatatan manual sebelum implementasi SIAK pada tahun 2013 serta kurangnya pemahaman masyarakat yang menganggap pencatatan sipil hanya diperlukan bagi ASN/TNI/Polri dan yang bekerja baik BUMN/BUMD/SWASTA. Untuk mempercepat pencatatan perkawinan, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran guna mendukung pelayanan sidang isbat nikah/pencatatan perkawinan massal secara terpadu melalui sistem jemput bola ke wilayah-wilayah pelosok.

D. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) merupakan identitas resmi Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang telah/pernah menikah. KTP-EI berfungsi sebagai landasan utama identifikasi kependudukan untuk mengakses berbagai pelayanan

publik, mulai dari perbankan, sertifikasi tanah, fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, hingga keterlibatan dalam pasar kerja formal.

Tabel 34 - Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – EL)

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib Ktp-El	Jumlah Perekaman Ktp-El	Jumlah Pencetakan Ktp-El	Persentase Pencetakan Ktp-El
Kota Waingapu	37.649	26.932	26.418	26.383	99,87
Haharu	7.376	5.223	5.088	5.075	99,74
Lewa	18.212	13.023	12.686	12.666	99,84
Nggaha Ori Angu	11.363	8.025	7.792	7.776	99,79
Tabundung	10.577	7.642	7.389	7.377	99,84
Pinu Pahar	8.257	5.738	5.547	5.527	99,64
Pandawai	20.530	14.222	13.840	13.802	99,73
Umalulu	20.892	14.646	14.232	14.179	99,63
Rindi	11.710	8.010	7.736	7.691	99,42
Pahunga Lodu	15.642	10.765	10.398	10.350	99,54
Wulla Waijilu	9.087	6.340	6.130	6.117	99,79
Paberiwai	7.201	4.730	4.527	4.504	99,49
Karera	9.199	6.428	6.202	6.181	99,66
Kahaungu Eti	10.870	7.406	7.158	7.117	99,43
Matawai La Pawu	7.358	5.091	4.904	4.888	99,67
Kambora	36.988	26.610	26.098	26.048	99,81
Kambata Mapambuhang	4.595	3.149	3.030	3.015	99,50
Lewa Tidahu	8.452	5.969	5.764	5.757	99,88
Katala Hamu Lingu	4.761	3.326	3.218	3.208	99,69
Kanatang	12.840	8.872	8.665	8.637	99,68
Ngadu Ngala	6.157	4.301	4.147	4.131	99,61
Mahu	5.370	3.388	3.228	3.222	99,81
TOTAL	285.086	199.836	194.197	193.651	99,72
Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026					

Cakupan layanan KTP-El di Kabupaten Sumba Timur telah mencapai kinerja sangat optimal. Berdasarkan data DKB Dukcapil Semester Pertama tahun 2026 dari total 199.836 jiwa penduduk wajib KTP-El, sebanyak 194.197 jiwa (97,18%) telah melakukan perekaman biometrik dan 193.651 jiwa (99,72% dari total perekaman) telah diterbitkan/dicetak fisik KTP-El yang diberikan kepada penduduk.

Efektivitas pencetakan KTP-El secara merata melampaui 99% di seluruh 22 kecamatan, dengan persentase pencetakan tertinggi berada di Kecamatan Lewa Tidahu (99,88%), Kota Waingapu (99,87%), Lewa (99,84%) dan Tabundung (99,84%). Tingginya capaian ini menunjukkan konsistensi pelayanan perekaman keliling (jemput bola) bagi penduduk pemula usia 17 tahun dan kelompok masyarakat rentan hingga wilayah pedalaman.

E. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen dasar kependudukan yang menunjukkan kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. KK memuat data vital seperti NIK, nama lengkap, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, agama, hingga status hubungan dalam keluarga. Kepemilikan KK menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan daerah serta basis verifikasi penerimaan pelayanan publik dan bantuan sosial dasar.

Kartu Keluarga memuat identitas berupa nama, NIK, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat, status perkawinan, pekerjaan, Pendidikan, status hubungan dalam keluarga, agama, kewarganegaraan, nama orang tua, dokumen imigrasi.

Informasi dari Kartu Keluarga, sehingga diperoleh data dasar kependudukan serta jumlah keluarga dalam wilayah administrasi pemerintahan tertentu seperti RT/RW, kelurahan/Desa/Kecamatan.

Data kepemilikan Kartu Keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 35 - Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga

Kecamatan	Kepala Keluarga	Belum Memiliki Kartu keluarga	Sudah Memiliki Kartu keluarga	Persentase Kepemilikan Kartu keluarga
Kota Waingapu	10.588	26	10.562	99,75
Haharu	2.212	14	2.198	99,37
Lewa	4.939	11	4.928	99,78
Nggaha Ori Angu	3.408	13	3.395	99,62
Tabundung	3.589	20	3.569	99,44
Pinu Pahar	2.359	15	2.344	99,36
Pandawai	5.496	18	5.478	99,67
Umalulu	5.611	13	5.598	99,77
Rindi	3.062	12	3.050	99,61
Pahunga Lodu	4.236	18	4.218	99,58
Wulla Waijilu	2.451	3	2.448	99,88
Paberiwai	2.036	5	2.031	99,75
Karera	2.530	13	2.517	99,49
Kahaungu Eti	3.003	11	2.992	99,63
Matawai La Pawu	2.147	20	2.127	99,07
Kambora	10.374	46	10.328	99,56
Kambata Mapambuhang	1.240	3	1.237	99,76
Lewa Tidahu	2.236	10	2.226	99,55
Katala Hamu Lingu	1.235	8	1.227	99,35
Kanatang	3.393	11	3.382	99,68
Ngadu Ngala	1.915	11	1.904	99,43
Mahu	1.617	9	1.608	99,44
TOTAL	79.677	310	79.367	99,61

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.



Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sumba Timur telah mencatatkan pencapaian yang hampir menyeluruh. Berdasarkan data DKB Dukcapil Semester Pertama tahun 2026 tingkat kepemilikan KK mencapai 99,61% (79.367 KK terdata memiliki dokumen KK dari total 79.677 Kepala Keluarga). Persentase kepemilikan tertinggi berada di Kecamatan Wulla Waijilu (99,88%), Lewa (99,78%) dan Umalulu (99,77%), sedangkan cakupan terendah berada di Kecamatan Matawai La Pawu (99,07%) dan Katala Hamu Lingu (99,35%).

Kendati capaian kepemilikan telah mendekati 100%, masih terdapat 310 KK (0,39%) yang terdata belum mencetak fisik dokumen KK miliknya. Kondisi ini umumnya terjadi pada pemohon layanan daring yang belum mencetak mandiri akibat keterbatasan fasilitas printer di daerah, atau belum melakukan pengambilan dokumen fisik pasca-pengajuan. Dinas Dukcapil terus mengupayakan penuntasan sisa target melalui optimalisasi pencetakan mandiri di kantor desa/kelurahan serta pendampingan layanan pemutakhiran data secara berkala.

F. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu pilar utama transformasi digital nasional yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. IKD mengintegrasikan seluruh data kependudukan ke dalam aplikasi smartphone secara aman dan praktis, sekaligus berfungsi sebagai instrumen Single Sign On (SSO) untuk mendukung sembilan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas nasional termasuk sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan dan kepolisian. Aktivasi IKD memerlukan pemenuhan syarat dasar, yakni penduduk telah melakukan perekaman KTP-EI, memiliki perangkat smartphoneserta terhubung dengan jaringan internet.

Tujuan dari IKD ini adalah :

1. Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.
2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk.
3. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.
4. Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Manfaat dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) :

1. Pembuktian identitas: dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan Identitas Kependudukan Digital .

2. Autentikasi identitas: dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi dan QR code untuk pembuktian pemilik Identitas Kependudukan Digital.
3. Otorisasi identitas: merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh Pengguna data.

Tabel 36 - Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
KOTA WAINGAPU	1.659	1.974	3.633
HAHARU	185	182	367
LEWA	368	421	789
NGGAHA ORI ANGU	213	218	431
TABUNDUNG	210	214	424
PINU PAHAR	136	141	277
PANDAWAI	482	535	1.017
UMALULU	440	535	975
RINDI	240	249	489
PAHUNGA LODU	229	383	612
WULLA WAIJILU	171	165	336
PABERIWAI	137	82	219
KARERA	166	173	339
KAHAUNGU ETI	262	220	482
MATAWAI LA PAWU	123	121	244
KAMBERA	1.298	1.645	2.943
KAMBATA MAPAMBUHANG	111	82	193
LEWA TIDAHU	167	146	313
KATALA HAMU LINGU	104	84	188
KANATANG	403	504	907
NGADU NGALA	128	110	128
MAHU	125	59	184
TOTAL	7.357	8.133	15.490

Sumber Data: DKB Dukcapil Kab. Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026.



Implementasi dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sumba Timur hingga Semester Pertama Tahun 2026 mencatatkan total warga yang telah melakukan aktivasi sebanyak 15.490 jiwa, dengan rincian 7.357 laki-laki dan 8.133 perempuan. Distribusi aktivasi IKD masih terfokus pada wilayah perkotaan serta pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan, di mana cakupan tertinggi berada di Kecamatan Kota Waingapu sebanyak 3.633 jiwa, disusul Kecamatan Kampera sebanyak 2.943 jiwa dan Kecamatan Pandawai sebanyak 1.017 jiwa. Sebaliknya, tingkat aktivasi terendah masih dijumpai pada wilayah pedalaman seperti Kecamatan Mahu (184 jiwa), Katala Hamu Lingu (188 jiwa) dan Kambata Mapambuhang (193 jiwa).

Jika diproyeksikan terhadap total penduduk wajib KTP-El di Kabupaten Sumba Timur yang mencapai 199.836 jiwa, maka tingkat penetrasi aktivasi IKD saat ini baru menyentuh angka 7,75%. Kendala utama dalam percepatan aktivasi ini meliputi keterbatasan kepemilikan perangkat smartphone berbasis Android/iOS pada sebagian masyarakat perdesaan, minimnya ketersediaan jaringan internet (blank spot) serta tingkat literasi digital yang perlu terus ditingkatkan.

Untuk merespons tantangan tersebut dan mengejar target integrasi layanan publik secara nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur terus menempuh langkah progresif melalui strategi pelayanan jemput bola (mobile registration). Layanan aktivasi secara kolektif digelar ke berbagai titik strategis, meliputi kantor-kantor dinas instansi pemerintah, Rumah Sakit, perguruan tinggi (seperti Universitas Kristen Wira Wacana/Unkriswina, AKPER Waingapu, dll), sekolah menengah atas (SMA), organisasi kewanitaan, hingga tingkat kantor desa dan kelurahan dan penduduk yang mengambil dokumen kependudukan diwajibkan untuk aktivasi IKD. Langkah ini bertujuan agar manfaat IKD dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga proses administrasi publik di Kabupaten Sumba Timur menjadi jauh lebih efisien, hemat biaya, transparan dan terjamin keamanannya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumba Timur Semester Pertama Tahun 2026 menggambarkan kondisi demografi daerah secara komprehensif, berbasis data resmi Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diolah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Kementerian Dalam Negeri per 30 Juni 2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi demografis yang sangat besar berkat dominasi populasi usia produktif, diiringi pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan dasar yang mendekati 100%. Namun demikian, pembangunan daerah masih dihadapkan pada tantangan kualitas sumber daya manusia, tingginya angka pencari kerja usia mudaserta perlunya akselerasi digitalisasi dokumen kependudukan secara merata hingga ke wilayah pedalaman.

Berdasarkan analisis data kependudukan secara menyeluruh, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Dinamika Demografi & Bonus Demografi:**

Total penduduk Kabupaten Sumba Timur tercatat sebanyak 285.086 jiwa (79.677 KK). Struktur kependudukan didominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun) sebesar 188.237 jiwa (66,03%) dengan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) rendah yaitu 49,04, menandakan daerah berada pada fase Bonus Demografi.

2. **Karakteristik Sosial, Pendidikan dan Ketenagakerjaan:**

- Pendidikan: Tingkat pendidikan Kepala Keluarga (KK) masih didominasi oleh jenjang dasar (Tamat SD/Sederajat sebesar 39,24% atau 31.265 KK) dan Tidak/Belum Sekolah sebesar 16,62% (13.239 KK), sementara KK berpendidikan tinggi (D1–S3) baru mencapai 8,98% (7.152 KK).
- Mata Pencarian: Sektor primer tetap menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, dengan 32,43% penduduk (92.458 jiwa) bekerja di bidang Pertanian dan Peternakan.
- Angkatan Kerja: Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) berada pada level cukup tinggi yakni 62,43%, dengan puncak partisipasi produktif berada pada kelompok usia 35–39 tahun (90,26%). Meskipun demikian, terdapat tantangan penyerapan 21.767 pencari kerja usia muda (15–29 tahun) serta ketergantungan pada pasar kerja luar daerah/migran.

3. Kesehatan & Kelompok Rentan:

- Angka Child Women Ratio (CWR) berada pada 20,86 (laju kelahiran stabil).
- Kesadaran profil medis dasar masih rendah, di mana 87,03% penduduk (248.115 jiwa) belum terdata/tidak tahu golongan darahnya.
- Penyandang disabilitas terdata sebanyak 1.180 jiwa (0,41%), didominasi disabilitas mental/jiwa (394 jiwa).

4. Capaian Dokumen Kependudukan (Adminduk):

- Kartu Keluarga (KK): 99,61% (79.367 KK).
- KTP-El: Pencetakan fisik mencapai 99,72% (193.651 jiwa) dari total perekaman biometrik.
- Akta Kelahiran: Anak usia 0–5 tahun mencapai 98,76% dan anak usia 0–17 tahun mencapai 96,94%, sedangkan Akta Kelahiran Umum (semua umur) baru 58,91%.
- Akta Perkawinan: Tercatat 50,90% (49.187 jiwa) dari populasi berstatus kawin.
- KIA: Cakupan penerbitan mencapai 52,71% (44.935 anak).
- IKD (Identitas Kependudukan Digital): Aktivasi baru mencapai 15.490 jiwa (7,75% dari wajib KTP-El) akibat kendala smartphone, jaringan internet perdesaan (blank spot) dan literasi digital.

SARAN STRATEGIS

1. Akselerasi Layanan & Inovasi Digital:

Mengoptimalkan aplikasi SIDARLIN dan layanan jemput bola terpadu untuk penuntasan target KIA, Akta Perkawinan massal, Akta Umumserta percepatan aktivasi IKD berbasis SPBE.

2. Integrasi Data Lintas Sektor:

Memperkuat sinergi antara Dukcapil, Bappeda, Dinas Transnaker, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Desa/Kelurahan dalam memanfaatkan data SIAK sebagai basis utama perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.

3. Penguatan Sektor Ekonomi Primer & Pelatihan Vokasi:

Memodernisasi sektor pertanian-peternakan serta menyediakan pelatihan keterampilan vokasi bagi pencari kerja usia muda dan Kepala Keluarga berpendidikan dasar guna menekan angka pengangguran.

4. Pelayanan Inklusif Perlindungan Anak & Disabilitas:

Menyediakan layanan door-to-door bagi kelompok disabilitas/lansia serta menjamin seluruh anak memiliki Akta Lahir dan KIA untuk mencegah eksploitasi dan menjamin akses pendidikan-kesehatan.

5. Penguatan Kapasitas SDM Aparatur:

Meningkatkan kompetensi teknis dan kualitas pelayanan aparatur adminduk di tingkat Kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan secara berkelanjutan.



PENUTUP

Profil Kependudukan Tahun 2026 diharapkan menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Timur yang lebih presisi, inklusif dan berdaya saing demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan masyarakat yang sejahtera.

-

